

REVIEW KEGIATAN DANA DOKA, DAK DAN APBK KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018-2023



BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAPPEDA KOTA LHOKEUMAWE
2023

Kata Pengantar

Laporan Review Anggaran DOKA, DAK serta APBK Kota Lhokseumawe ini disusun dalam rangka untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan yang afektif. setiap Kabupaten Kota menerima Dana Transfers dari pemerintah pusat dalam menjalankan roda pemerintahan, mengalokasikan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan, evaluasi, dan transparansi dalam pengelolaan sumber dana yang didapatkan daerah sangatlah krusial.

Dalam Laporan review ini, kami akan memberikan gambaran tentang sumber dana DOKA, DAK serta APBK yang didapat dari Pemerintah Pusat mulai Tahun 2018–2023 Kota Lhokseumawe yang mencakup persentase setiap tahunnya, persentase penggunaan perbidang serta klasifikasi program kegiatan yang terdiri dari Fisik, Non Fisik serta pengadaan yang diperoleh dari komperasi rekapitulasi data usulan Perangkat Daerah dan realisasi penyerapan Anggaran yang disajikan. Laporan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mewujudkan Pembangunan yang merata serta berkelanjutan.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan review ini, termasuk Bidang Koordinasi dan juga Perangkat Daerah Pengampu DOKA, DAK serta APBK. Semoga laporan ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat, menginspirasi perbaikan terus-menerus dalam pengelolaan keuangan kota, dan membantu mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik bagi Kota Lhokseumawe.

Penyusun

DAFTAR ISI

1. Pengantar Review DOKA Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023.....	1
2. Distribusi Dana Doka Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023.....	2
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	3
4. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	4
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.....	5
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6
7. Dinas Kesehatan	9
8. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, dan Majelis Permusyawaratan Ulama	10
9. Dinas Sosial.....	12
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	13
11. Dinas Perhubungan	15
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17
13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	18
14. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	18
15. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.....	19
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandi.....	20
17. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB.....	22
18. Kesimpulan Review DOKA Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023	23
19. Pengantar Review DAK Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023	25
20. Distribusi DAK Kota Lhokseumawe.....	26
21. Rekapitulasi DAK Fisik Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022	27
22. DAK Fisik Bidang Air Minum	28
23. DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman.....	28
24. DAK Fisik Bidang Sanitasi.....	28
25. DAK Fisik Bidang Jalan	28
26. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.....	28
27. DAK Fisik Bidang Kesehatan	28
28. DAK Fisik Bidang Kesehatan KB	29
29. DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup	29
30. DAK Fisik Bidang Pasar.....	29
31. DAK Fisik Bidang Pendidikan	29
32. DAK Fisik Bidang Pertanian.....	29
33. Rekapitulasi DAK Non Fisik Kota Lhokseumawe 2018-2022	30

34. DAK Non Fisik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	31
35. DAK Non Fisik Kesehatan.....	31
36. DAK Non Fisik DKPPP	31
37. DAK Non Fisik DPMTSP dan Naker	31
38. DAK Non Fisik DPPPAP dan KB.....	31
39. DAK Non Fisik Disperindagkop dan UKM	31
40. DAK Non Fisik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	32
41. Kesimpulan Review DAK Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023	33
42. Pengantar Review APBK Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023	34
43. Gambaran Umum APBK Tahun 2018-2023	35
44. Gambaran Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe	36
45. Komposisi Pendapatan Asli Daerah.....	37
46. Komposisi Pendapatan Tranfer Pemerintah Provinsi.....	38
47. Gambaran Belanja Daerah Kota Lhokseumawe	39
48. Rata-rata pagu perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.....	40
49. Alokasi Belanja Menurut Pemerintah Daerah.....	41
50. Alokasi Belanja Menurut Bidang Urusan Pemerintahan.....	42
51. Gambaran Realisasi APBK Lhokseumawe.....	45
52. Gambaran Pembiayaan Daerah Kota Lhokseumawe	46
53. Kesimpulan Review APBK Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023	47
54. Referensi.....	48

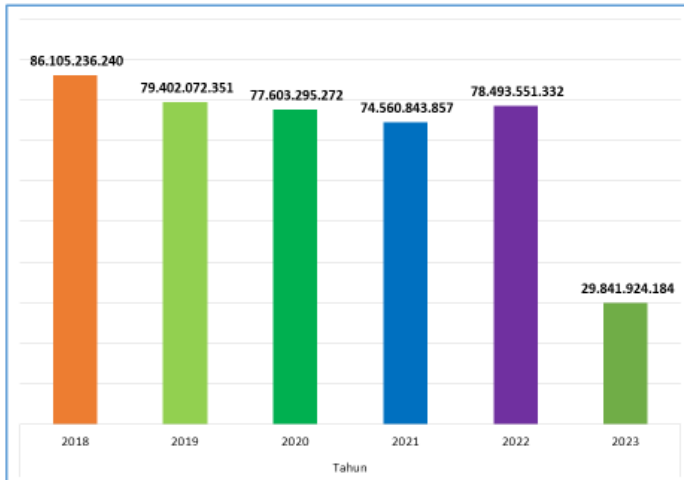


REVIEW KEGIATAN DOKA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018- 2023

Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan yang strategis dan mempunyai daya dorong yang kuat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Dana Otsus ditujukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan daerah dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota. Meskipun Pemerintah Pusat menyalurkan dana otsus melalui pemerintah provinsi, namun dana otsus juga merupakan penerimaan bagi kabupaten/kota. Penggunaan Dana Otsus digunakan untuk membiayai 7 sektor pembangunan, yaitu infrastruktur, ekonomi, kemiskinan, pendidikan, sosial dan kesehatan, termasuk pelaksanaan keistimewaan Aceh. Pembiayaan pembangunan yang tepat pada keseluruhan sektor ini diharapkan dapat menjadi pendorong yang kuat bagi daerah untuk memacu pembangunan.

Penyusunan program yang akan didanai oleh anggaran otonomi khusus harus merupakan program dan kegiatan pembangunan yang strategis, dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, nyata dan adil, sesuai dengan amanah Qanun No. 2 Tahun 2008 dan Qanun No. 2 Tahun 2013 menjadi tolok ukur untuk berhasilnya program yang bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat Aceh secara menyeluruh. Selain itu, penyusunan program juga harus memenuhi kriteria pemilihan dan kegiatan yang diatur melalui Pergub yang dikeluarkan untuk tahun anggaran berjalan.

Perolehan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) untuk Kota Lhokseumawe selama tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Untuk tahun 2018-2022, perolehan DOKA berada dikisaran angka lebih dari 70 milyar hingga 86 milyar. Namun pada tahun 2023, angka perolehan DOKA menurun drastis menjadi 29 milyar karena sesuai dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, pasal 183 ayat (2) menyebutkan bahwa “...*dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh (2023 -2027) besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional*”.



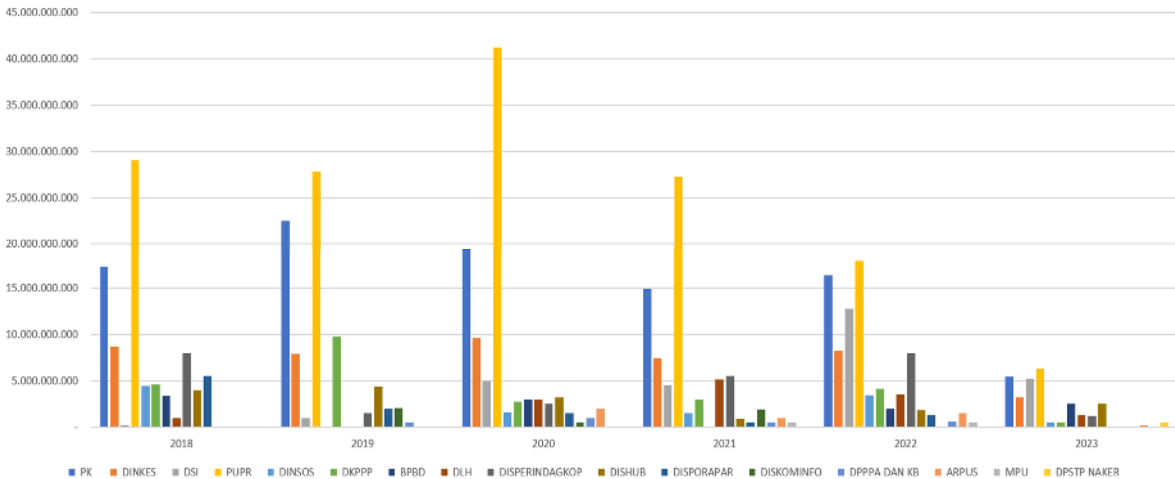
Source: Data Kesepakatan DOKA 2018-2023, Bappeda.

OPD PELAKSANA

1. Urusan Pendidikan (Dinas PK)
2. Urusan Kesehatan (Dinkes)
3. Urusan Keistimewaan
 - Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah
 - Majelis Permusyawaratan Ulama
 - Majelis Pendidikan Daerah
 - Majelis Adat Aceh
 - Baitul Mal
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
6. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
7. Dinas Sosial
8. Dinas Pemuda Dan Olahraga
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
10. Dinas Perhubungan
11. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
14. Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik
15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

Pengelolaan DOKA Kota Lhokseumawe selama tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Dapat dilihat bahwa selain untuk alokasi mandatory spending bidang pendidikan 20% dan bidang Kesehatan 10%, alokasi terbesar DOKA berada di Dinas PUPR sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur.

DISTRIBUSI PENGELOLAAN DANA DOKA KOTA LHOKSEUMAWA TAHUN 2018-2023

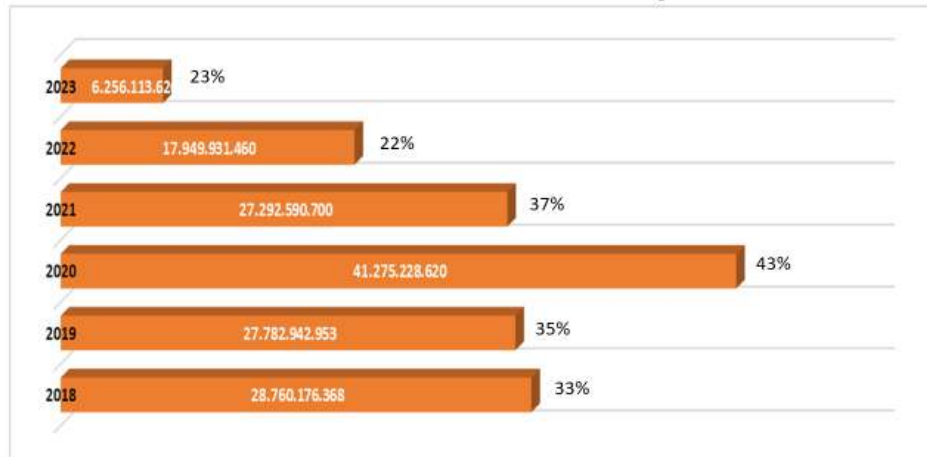


Source: Data Kesepakatan DOKA 2018-2023, Bappeda.

1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

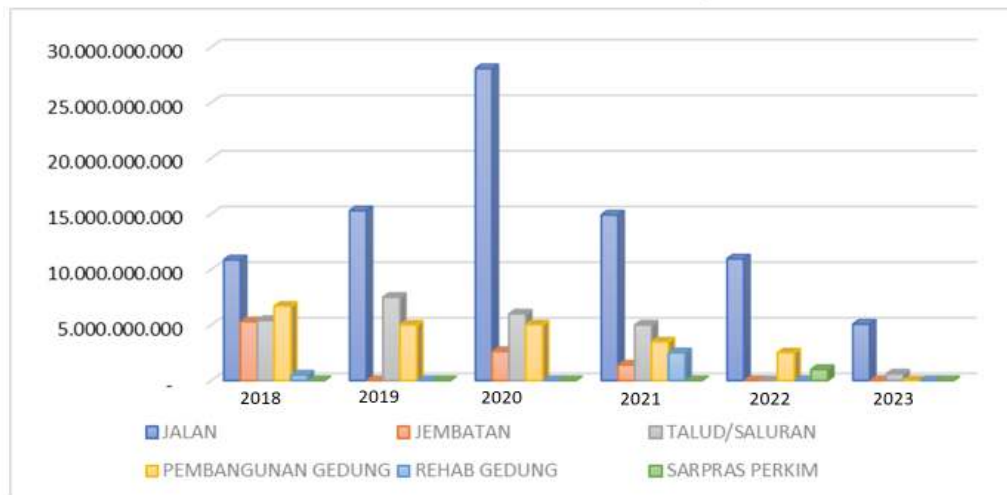
Alokasi dana DOKA yang diterima oleh Dinas PUPR selama tahun 2018-2023 selalu mendapatkan persentase paling besar dari total DOKA tahun terkait. Bahkan pada tahun 2020 dinas PUPR mendapatkan porsi DOKA sebesar 43%. Sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur, wajar apabila PUPR selalu mendapat porsi terbesar.

Alokasi Dana dan Persentase Terhadap DOKA



2018	2019	2020	2021	2022	2023
86.105.236.240	79.402.072.351	96.137.969.458	74.560.843.857	78.493.551.332	29.841.924.184

Alokasi Dana Berdasarkan Porsi Kegiatan



Dilihat dari porsi kegiatan, dinas PUPR memberikan porsi terbesar setiap tahunnya untuk kegiatan jalan dan pembangunan gedung, sedangkan kegiatan sarana prasarana permukiman porsi anggarannya sangat sedikit.

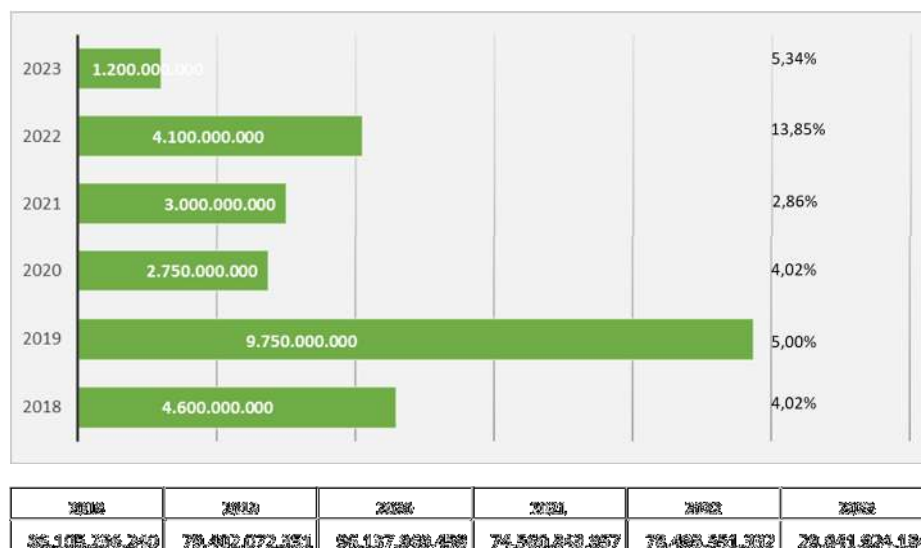
Selama tahun 2019-2023 kegiatan dana DOKA yang telah dilakukan Dinas PUPR:

- 39 ruas jalan dilakukan peningkatan jalan dan pembangunan jalan di 11 ruas jalan baru.
- 9 pembangunan jembatan dan 1 ruas penggantian jembatan
- Pembangunan saluran sepanjang 2,77 km
- Pembangunan pengaman pantai cunda meraksa pada tahun 2019-2021 dengan nilai Rp.17 milyar
- Pembangunan bertahap Masjid Islamic Center pada tahun 2018 – 2021 dengan nilai Rp. 15,5 milyar. Pembangunan Masjid Islamic Center dilanjutkan dengan DOKA 2022 dan 2023 senilai Rp. 2,7 milyar yang kegiatannya dilakukan oleh Dinas Syariat Islam
- Pembangunan 8 masjid di beberapa gampong senilai Rp. 4,2 milyar pada tahun 2018, 2020, 2021
- Tahun 2022 dibangun sarana prasarana Permukiman Relokasi masyarakat Blang Naleung Mameh ke Padang Sakti senilai Rp. 1 milyar
- Pada tahun 2021 terdapat silpa senilai Rp. 6,5 milyar untuk pekerjaan pembangunan jalan yang tidak bisa dilaksanakan karena masalah lahan.
- Tahun 2021 dilakukan pembangunan lanjutan Gedung Pelatihan BKPSDM dan Pembangunan Gedung IMPKL tahap ketiga.
- Tahun 2022 dilakukan pembangunan lanjutan Gedung P2TP2A.

2. DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN

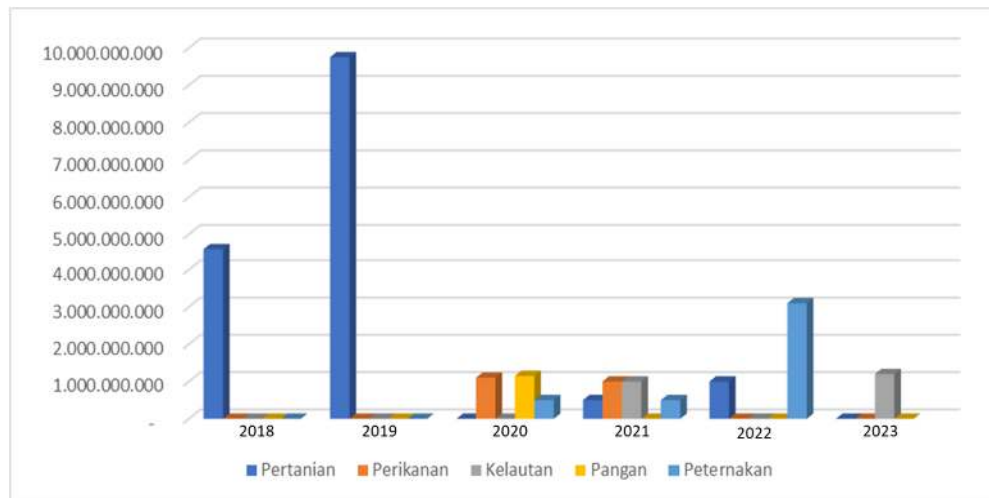
Alokasi DOKA yang dikelola oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan (DKP3) selama tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Persentase DOKA untuk DKP3 rata-rata berkisar antara 2% - 5%, kecuali untuk tahun 2022, persentasenya sebesar 13,85% dari total DOKA Kota Lhokseumawe.

Alokasi Dana dan Persentase Terhadap DOKA



Alokasi DOKA berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh DKP3 dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Dapat dilihat bahwa selama tahun 2018-2022 penggunaan DOKA pada DKP3 didominasi dengan kegiatan bidang pertanian, sementara di tahun 2023 DOKA hanya ada untuk bidang kelautan. Kegiatan yang dilakukan dibidang pertanian selama tahun 2018-2022 lebih banyak pada pembuatan saluran air di area pertanian, pembuatan sumur bor dan pengadaan sarana pertanian lainnya.

Alokasi Dana Berdasarkan Perak Kegiatan

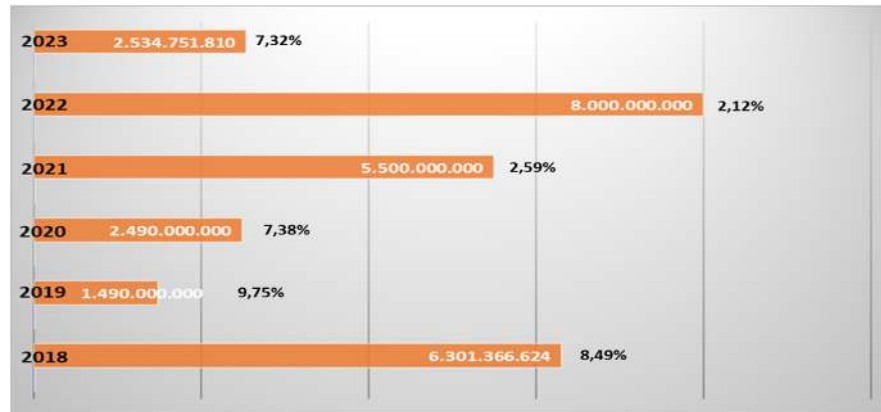


Dapat dilihat juga bahwa selama tahun 2018-2023, bidang pangan hanya mendapatkan alokasi kegiatan DOKA di tahun 2020 dikarenakan adanya program ketahanan pangan dari provinsi untuk meningkatkan ketahanan pangan disaat pandemi covid-19.

3. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

Alokasi DOKA yang dikelola oleh dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindakop) selama tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Selama tahun 2018-2021 Persentase DOKA untuk Disperindakop rata-rata berada diatas 7% dari total pagu kecuali untuk tahun 2021 dan 2022 persentasenya menurun menjadi sekitar 2%.

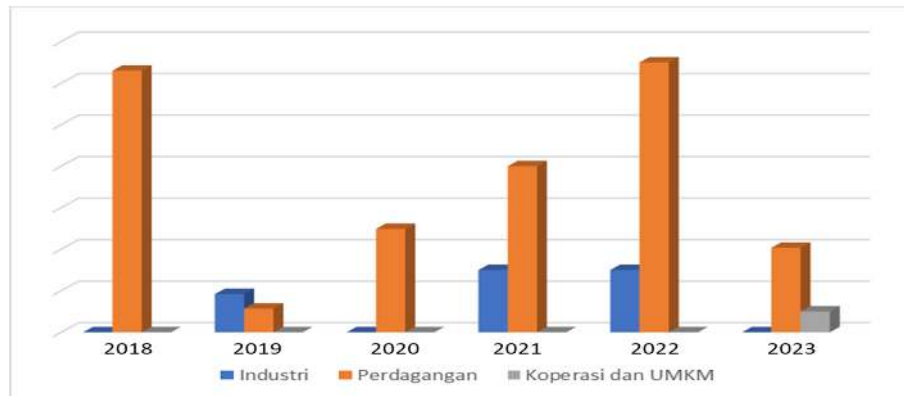
Alokasi Dana dan Persentase Terhadap DOKA



Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PAGU	86.105.290.790	78.400.072.921	86.187.800.458	74.590.276.867	78.804.951.890	34.941.624.164

Penggunaan DOKA selama tahun 2018-2023 setiap tahunnya didominasi untuk kegiatan bidang perdagangan dan industry, sementara untuk bidang koperasi dan UMKM baru ada anggaran kegiatan ditahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

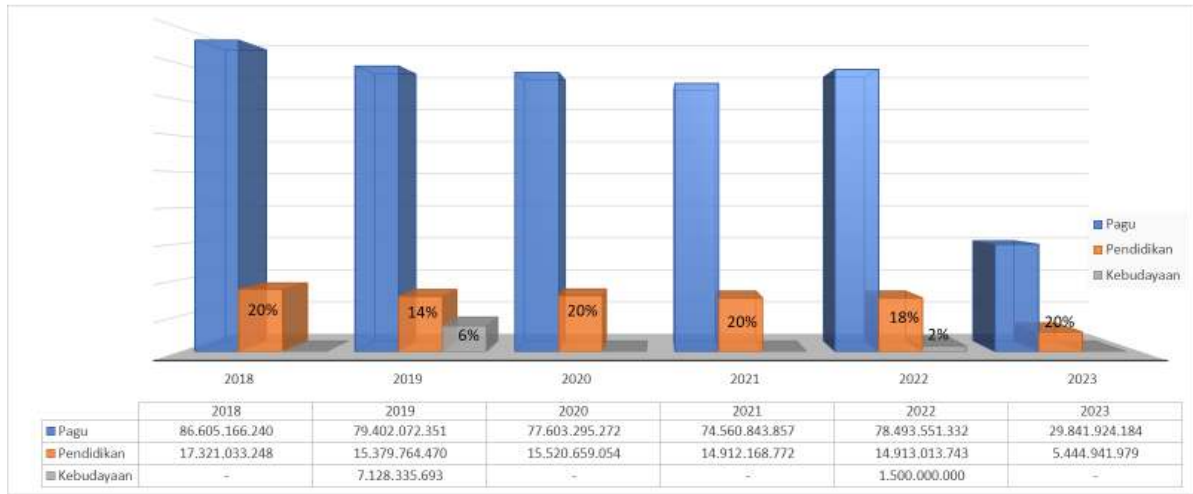
Alokasi Dana Berdasarkan Jenis Kegiatan



4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

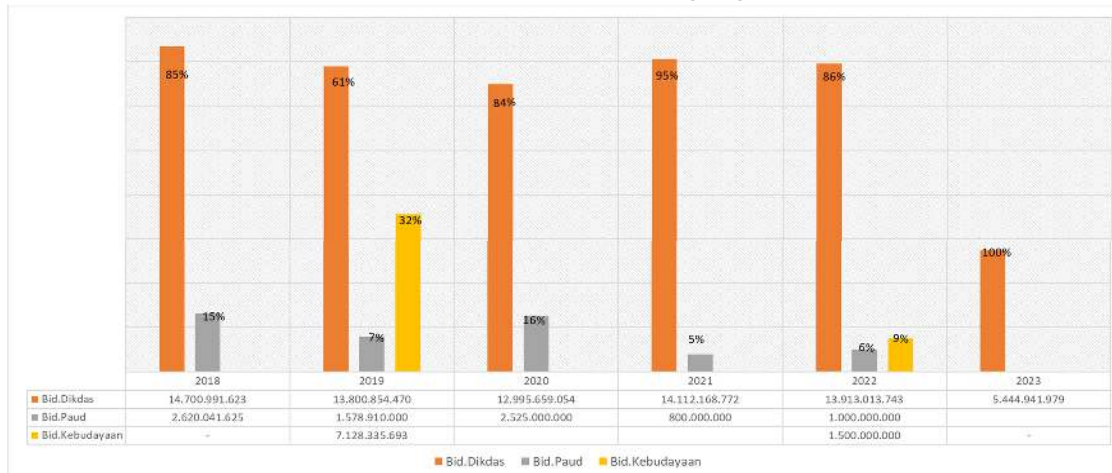
Alokasi DOKA yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) selama tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Selama tahun 2018-2021 Persentase DOKA untuk Dinas PK merupakan mandatory minimal 20% dari total PAGU. Dari grafik dapat dilihat juga bahwa mandatory untuk pendidikan 20% pada di tahun 2019 dan tahun 2022 sebenarnya belum terpenuhi karena masih terbagi untuk bidang kebudayaan. Sesuai aturannya, mandatory 20% hanya untuk Pendidikan, tidak termasuk kebudayaan.

Alokasi Dana dan Persentase Terhadap DOKA



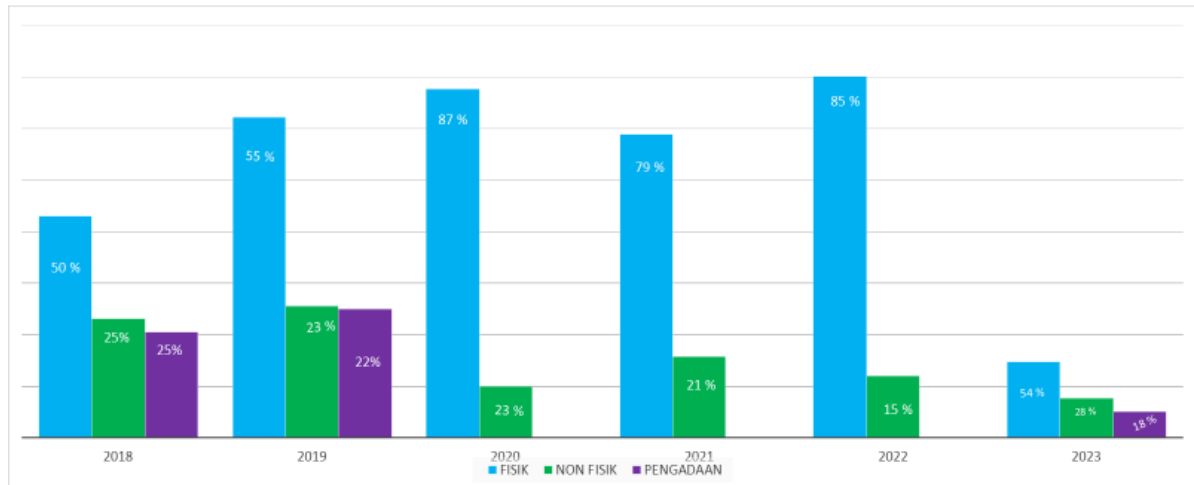
Penggunaan DOKA untuk dinas PK selama tahun 2018-2023 dilihat dari bidang kegiatannya dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya kegiatan DOKA Pendidikan didominasi untuk bidang Pendidikan dasar, sementara untuk bidang PAUD hanya mendapatkan alokasi antara 5% hingga 19%, sementara untuk bidang kebudayaan tidak pernah mendapatkan anggaran.

Alokasi Dana Berdasarkan Bidang Kegiatan



Bila dilihat dari jenis kegiatan, setiap tahunnya didominasi untuk kegiatan fisik. Sementara untuk kegiatan non fisik anggaran setiap tahunnya tidak lebih dari 27% dan untuk kegiatan pengadaan juga sangat sedikit bahkan ditahun 2020 – 2022 tidak ada alokasi untuk kegiatan pengadaan.

Alokasi Dana Berdasarkan Jenis Kegiatan



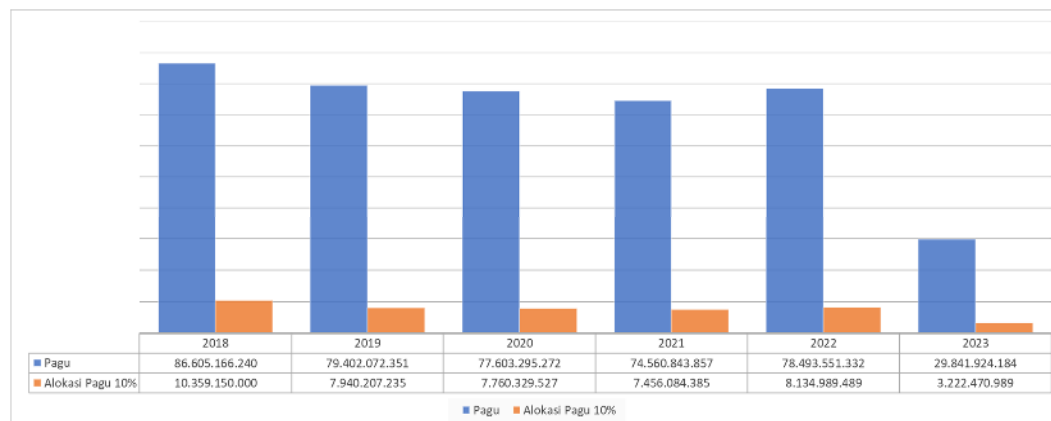
Selama tahun 2018-2023, DOKA pada dinas PK telah dimanfaatkan untuk:

- Membangun 8 Ruang Kelas Baru sebanyak Tingkat PAUD
- Membangun 15 Ruang Kelas Baru sebanyak Tingkat SD
- Membangun 21 Ruang Kelas Baru sebanyak Tingkat SMP
- Membangun sebanyak 11 LAB Sekolah
- Dan Telah Terbangun 1 Gedung Kesenian dan 1 Gedung Peningkatan Mutu Guru
- Peningkatan SDM Bagi Operator Sekolah dan Guru
- Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Gedung Kesenian)

5. DINAS KESEHATAN

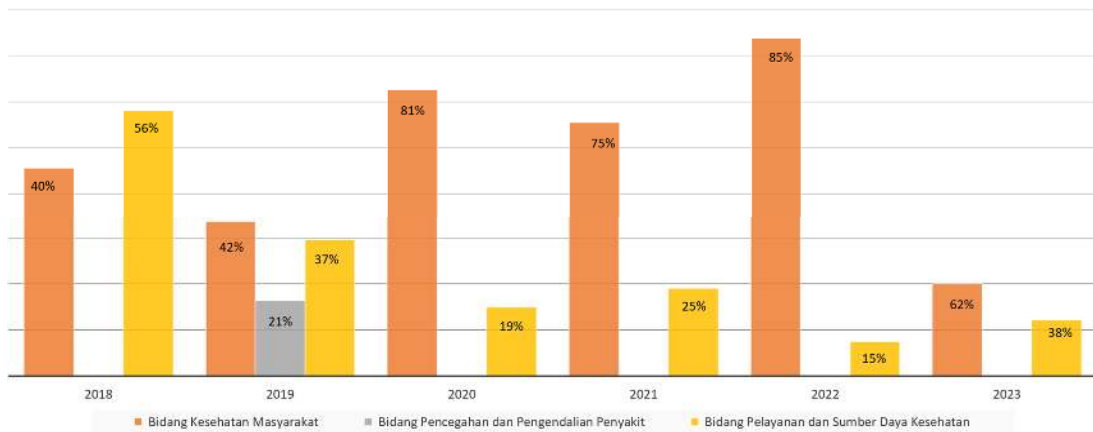
Bidang Kesehatan merupakan bidang mandatory spending yang nilainya tidak boleh kurang dari 10% dari total anggaran DOKA. Selama tahun 2018-2023 mandatory spending untuk bidang Kesehatan selalu terpenuhi 10% dan selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Alokasi Dana dan Persentase Terhadap DOKA



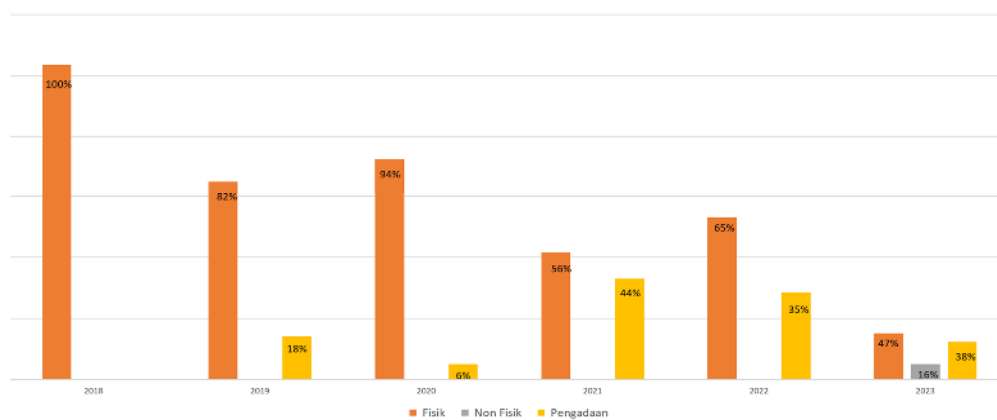
Dilihat dari bidang yang mendapatkan alokasi DOK kesehatan selama tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Dapat dilihat bahwa bidang yang mendapatkan prioritas pendanaan setiap tahunnya adalah bidang Kesehatan masyarakat dan bidang Pelayanan dan Sumber daya Kesehatan, sedangkan bidang pencegahan hanya mendapatkan anggaran tahun 2019 dimana saat ini terjadi pandemic covid-19.

Alokasi Dana Berdasarkan Bidang Kegiatan



Apabila dilihat dari jenis kegiatan yang dilakukan, selama tahun 2018-2023 setiap tahun alokasi terbesar adalah untuk kegiatan fisik. Bahkan ditahun 2018 seluruh DOKA kesehatan (100%) dialokasikan untuk kegiatan fisik. Hingga tahun 2022 lebih dari 50% alokasi DOKA kesehatan digunakan untuk pembangunan fisik. Untuk kegiatan pengadaan alokasi anggarannya mulai meningkat di tahun 2021, sedangkan untuk kegiatan non fisik baru tahun 2023 mendapatkan anggaran kegiatan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Alokasi Dana Berdasarkan Jenis Kegiatan



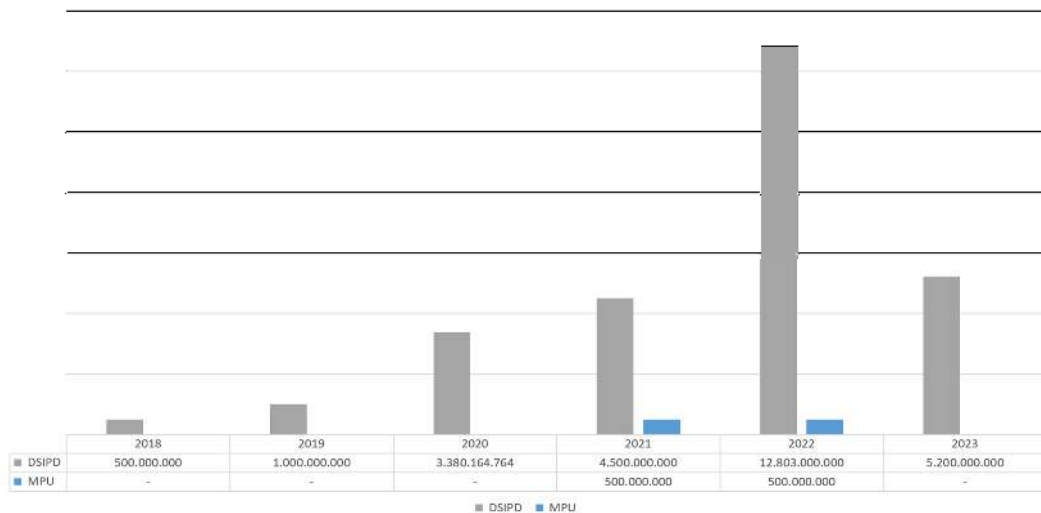
Selama tahun 2018-2023, DOKA Kesehatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Renovasi 12 Puskesmas Pembantu, 7 Puskesmas dan 8 Poskesdes
- Pengadaan mobil ambulance sebanyak 6 unit
- Membangun Gudang farmasi
- Membangun 1 Gedung UTD Kota Lhokseumawe
- Membangun 1 gedung PSC Kota Lhokseumawe
- Membangun 1 Rumah Dinas Tenaga Kesehatan dan Dokter di Puskesmas Kandang dan Rumah Dinas Dokter di Puskesmas Blang Mangat

6. DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH DAN MAJELIS PERMUSYAWATAN ULAMA (DOKA URUSAN KEISTIMEWAAN ACEH)

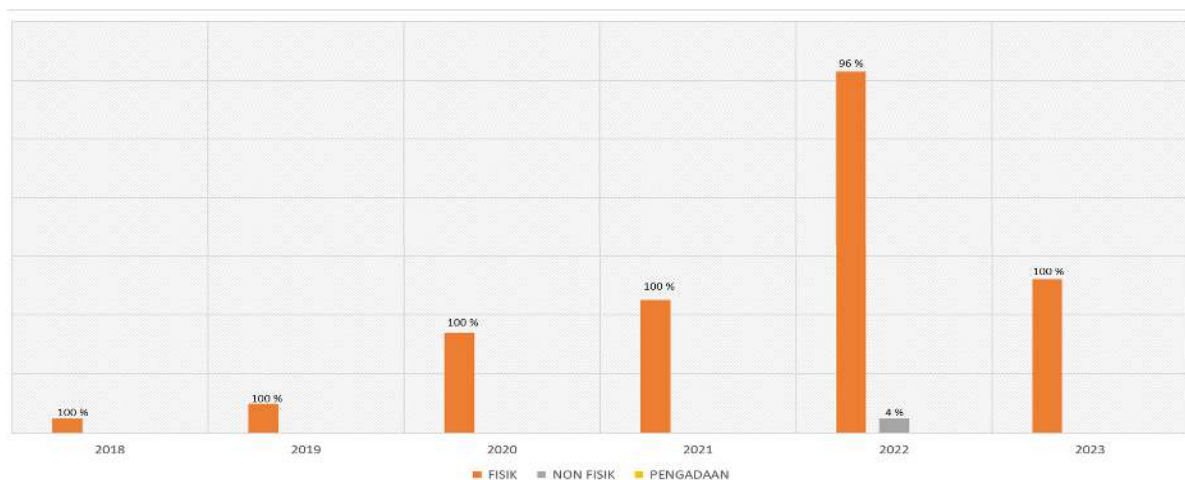
Pelaksana urusan Keistimewaan dan Kekhususan Aceh di Kota Lhokseumawe yang mendapatkan alokasi DOKA tahun 2018-2023 adalah Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah (DSIPD) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Alokasi DOKA Untuk Urusan Keistimewaan Tahun 2018-2023



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa DOKA untuk urusan keistimewaan banyak dialokasikan untuk Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, sementara untuk Majelis Permusyawaratan Umat mendapatkan anggaran di tahun 2021 dan 2022. Untuk jenis kegiatan yang dilakukan selama tahun 2018-2023, informasinya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Alokasi DOKA Berdasarkan Jenis Kegiatan



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa DOKA untuk urusan keistimewaan yang dikelola oleh DSIPD selama tahun 2018-2023 selalu digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik. Kegiatan non fisik dan pengadaan tidak pernah mendapatkan porsi anggaran.

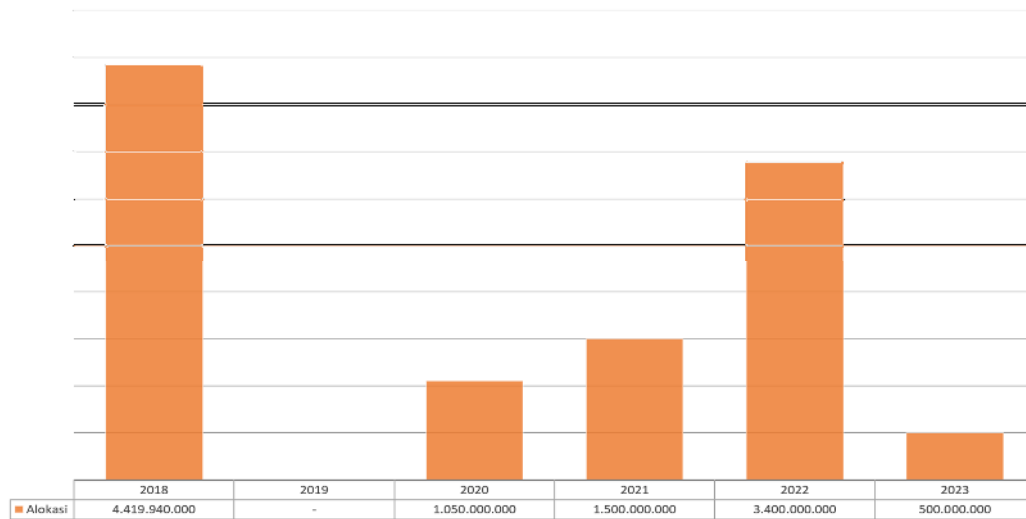
Selama tahun 2018-2023 Kegiatan yang telah dilakukan untuk urusan keistimewaan antara lain:

- Membangun 31 asrama santri dayah dalam wilayah Kota Lhokseumawe.
- Membangun BLKS (Balai Latihan Kerja Santri) sebanyak 2 Unit Yaitu 1 Unit Dayah Riyadhatul Qulub Gampong Baloi dan Bustanus Sa'adah Al- Munawwarah Gampoeng Rayek Kareung.
- Lanjutan Pembangunan 12 Mesjid di Kota Lhokseumawe
- Lanjutan Pembangunan Mesjid Agung Islamic Center dari Tahun 2018-2023 Menyerap Anggaran Rp.18.191.246.514,- (Delapan Belas Miliyar Seratus Sembilan puluh satu dua ratus empat puluh enam lima ratus empat belas rupiah) Pengalokasi Pagu DOKA untuk pembangunan Islamic center yang di Kelola oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah hanya pada tahun tahun 2022 dengan dana Rp.2.000.000.000 dan Pada tahun 2023 dengan dana Rp. 700.000.000,-. Dan pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 pembangunan dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Lhokseumawe dikarenakan perubahan nomenkelatur rekening kegiatan.
- Dari lima urusan keistimewaan Yaitu, Dinas Syariat Islam, Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), dan Baitul Mal Pengalokasian Dana Doka Hanya didominasi Oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan dayah.
- Urusan Keistimewaan lainnya seperti MPU baru mendapatkan pengalokasian Pagu Doka pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp.500.000.000,- dan pada tahun 2022 Rp. 500.000.000,- untuk kegiatan kaderisasi ulama. Sedangkan untuk 3 (tiga) urusan Keistimewaan lainnya belum pernah mendapatkan pengalokasian dana.

7. DINAS SOSIAL

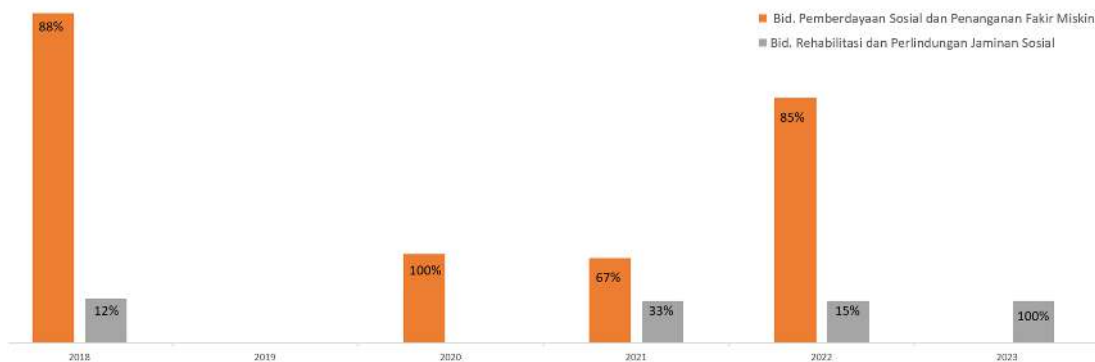
Dinas sosial merupakan salah satu dinas yang mendapatkan alokasi DOKA selama tahun 2018-2023, hanya tahun 2019 saja yang tidak ada anggaran untuk kegiatan dinas sosial. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Alokasi DOKA Dinas Sosial Tahun 2018-2023

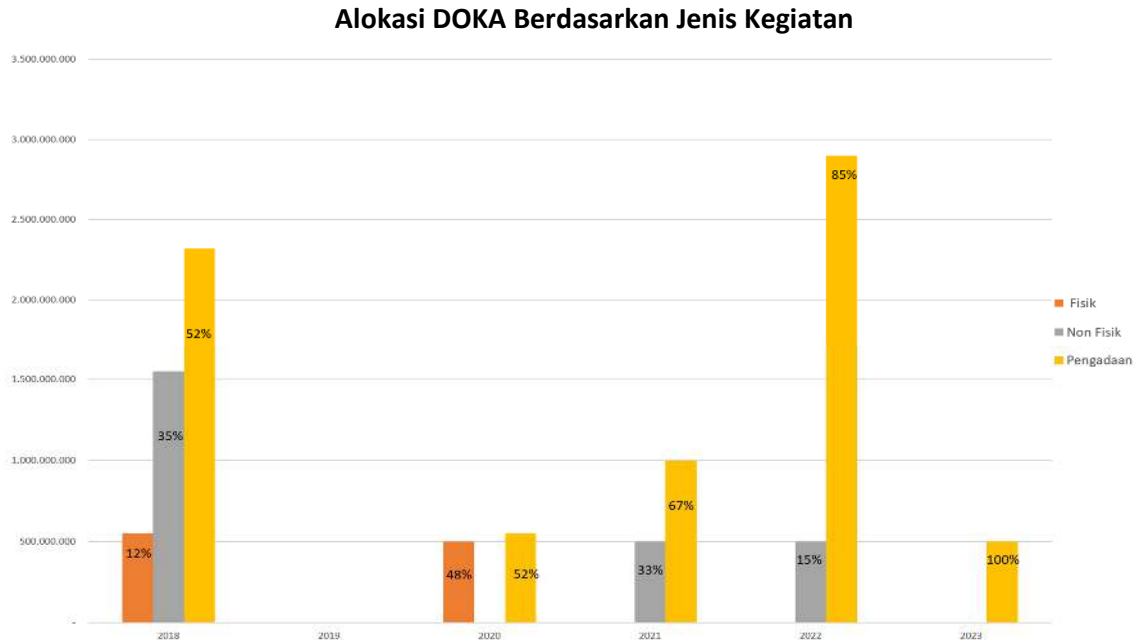


Apabila dilihat dari bidang kegiatannya, bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mendapatkan porsi anggaran lebih besar dibandingkan dengan bidang kegiatan Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial. Namun di tahun 2023, seluruh alokasi DOKA Dinas Sosial diberikan untuk bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini

Alokasi DOKA Berdasarkan Bidang Kegiatan



Bila dilihat dari jenis kegiatan yang dilakukan, DOKA dinas Sosial banyak dihabiskan untuk melakukan kegiatan pengadaan. Bahkan di tahun 2023 seluruh anggaran DOKA digunakan untuk pengadaan. Selengkapnya tentang jenis kegiatan yang dilakukan untuk DOKA pada Dinas Sosial dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



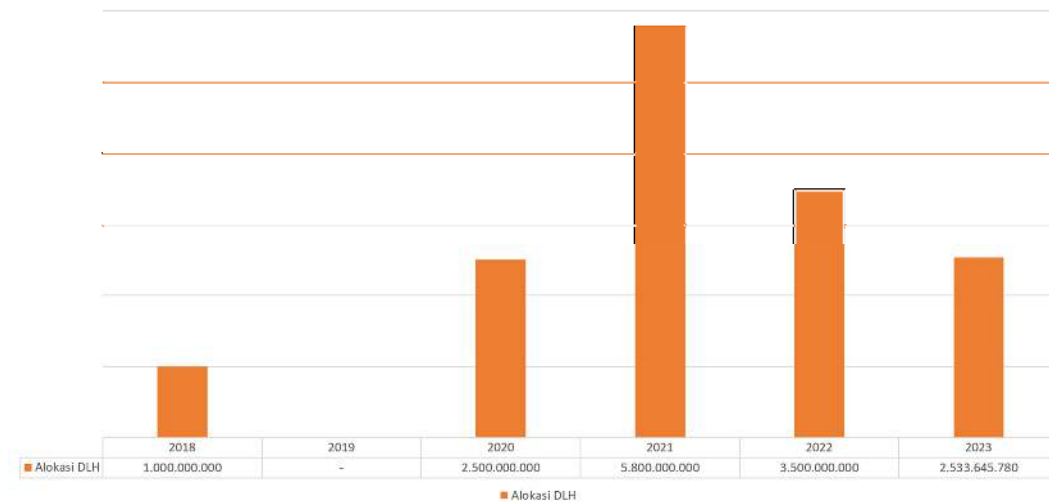
Beberapa pengadaan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial selama tahun 2018-2023 dengan anggaran dari DOKA antara lain:

- Pengadaan Sepeda Motor Modifikasi Roda tiga untuk penyandang cacat sebanyak 20 Unit.
- Pengadaan Becak Angkutan Barang untuk penduduk miskin sebanyak 18 Unit.
- Serta Pembangunan 1 Unit Gudang Logistik.

8. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

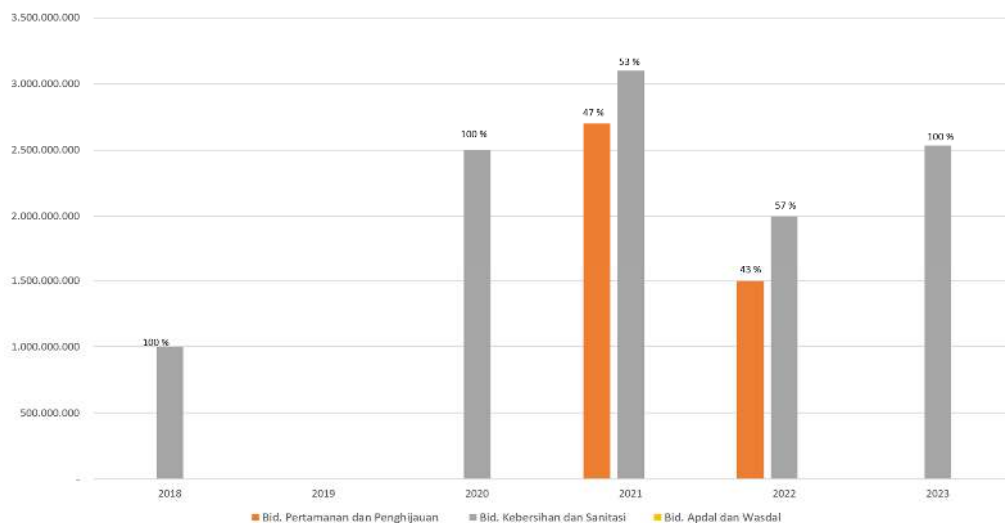
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) juga salah satu dinas yang selalu mendapatkan porsi dari anggaran DOKA. Selama tahun 2018-2023, hanya tahun 2019 DLHK tidak mendapatkan porsi DOKA. Anggaran yang diberikan dari DOKA untuk DLHK juga nilainya tergolong besar untuk melakukan kegiatan. Alokasi DOKA pada DLH selama tahun 2018-2023 selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Alokasi DOKA pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2018-2023



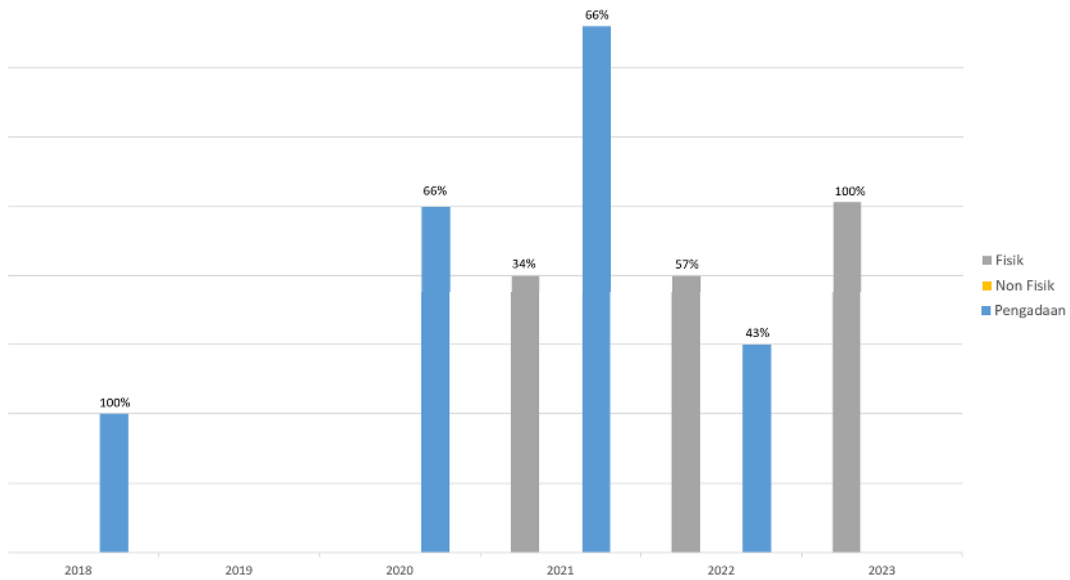
Bila dilihat dari bidang pelaksanaannya, DOKA untuk DLHK selama tahun 2018-2023 selalu digunakan untuk Bidang Kebersihan dan Sanitasi. Bidang pertamanan dan penghijauan hanya memperoleh anggaran ditahun 2021 dan 2022, sementara bidang Apdal dan Wasdal belum pernah mendapatkan alokasi anggaran DOKA. Selengkapnya dapat dilihat pada grafi dibawah ini.

Alokasi DOKA Berdasarkan Bidang Kegiatan



Untuk jenis kegiatan yang dilakukan oleh DLH dengan DOKA yang diperoleh selama tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Dapat dilihat bahwa kegiatan fisik dan kegiatan pengadaan mendominasi kegiatan dibidang kebersihan dan sanitasi. Bahkan selama lima tahun kebelakang, belum pernah dilakukan kegiatan yang berupa kegiatan non fisik.

Alokasi DOKA Berdasarkan Jenis Kegiatan



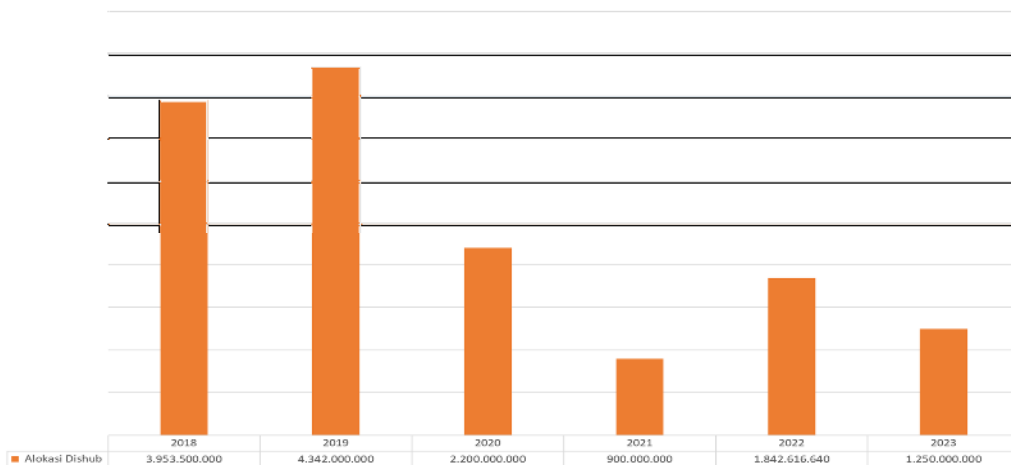
Beberapa kegiatan yang dapat diketahui selama tahun 2018-2023 pada DLHK dengan anggaran DOKA antara lain:

- Pengadaan Pengadaan Truck Amr Roll Sampah Plus Bin Container 1 Unit
- Pengadaan Bin Container sebanyak 38 Unit
- Pengadaan Tiang dan pemasangan Lampu solar cell di empat kecamatan

9. DINAS PERHUBUNGAN

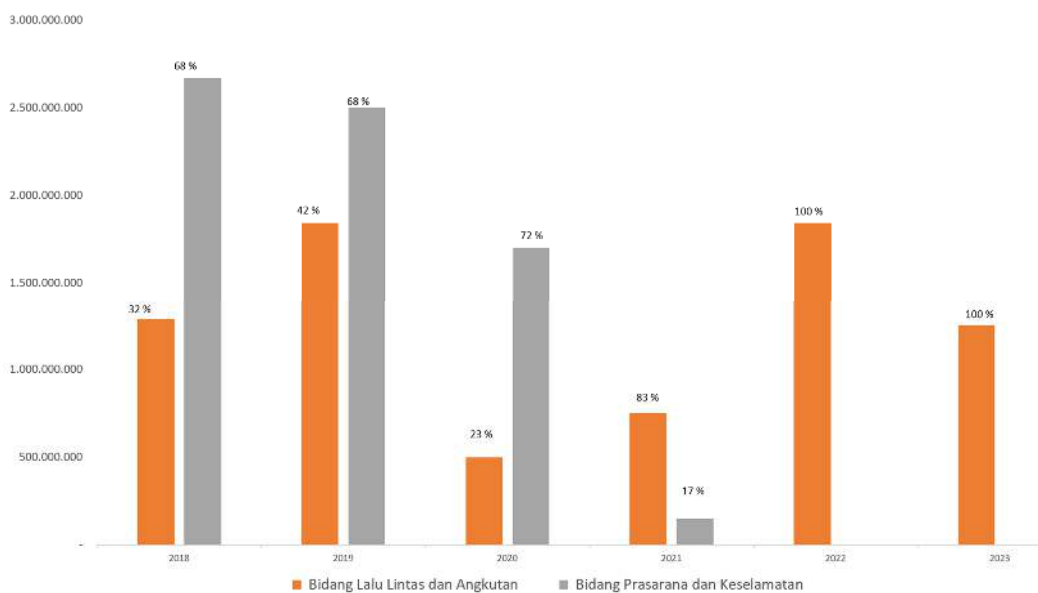
Dinas Perhubungan adalah salah satu dinas yang setiap tahunnya mendapatkan alokasi dari DOKA. Selama tahun 2018-2023 anggaran yang diperoleh juga bernilai cukup besar, terutama pada tahun 2019 yang nilainya mencapai 4 milyar lebih. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Alokasi DOKA pada Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023



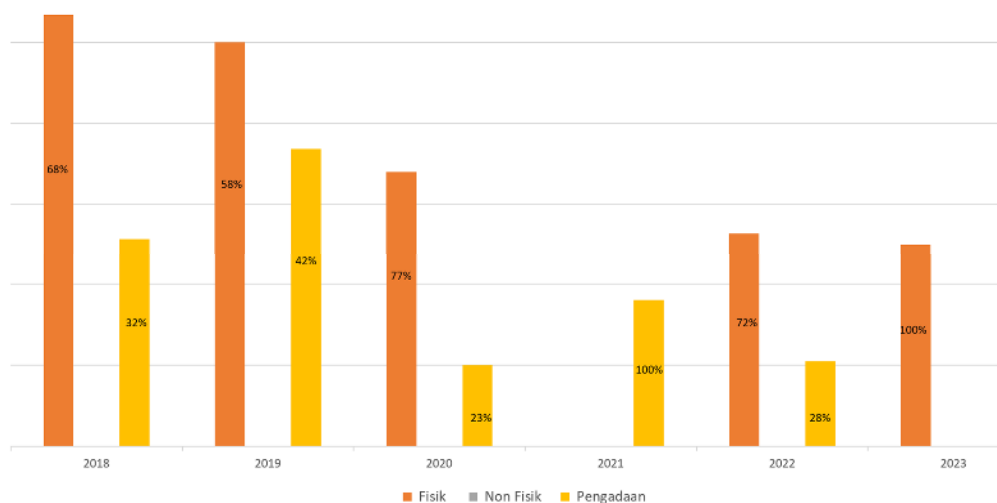
Bila dilihat dari bidang kegiatan yang mendapatkan anggaran DOKA, dari grafik dibawah ini dapat diketahui bahwa bidang Lalu Lintas dan Angkutan selalu mendapatkan anggaran kegiatan dari DOKA selama tahun 2018-2023, sementara untuk bidang Prasarana dan Keselamatan hanya mendapatkan anggaran DOKA di tahu 2018-2021.

Alokasi DOKA Berdasarkan Bidang Kegiatan



Untuk jenis kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan anggaran DOKA selama tahun 2028-2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Dapat dilihat bahwa jenis kegiatan fisik dan kegiatan pengadaan selalu mendominasi. Namun untuk kegiatan non fisik, belum pernah dilakukan apapun selama lima tahun terakhir ini.

Alokasi DOKA Berdasarkan Jenis Kegiatan



Beberapa kegiatan yang dapat diperoleh dari DOKA selama tahun 2028-2023 pada Dinas Perhubungan antara lain:

- Pengadaan Bus Sekolah Sebanyak 3 Unit
- Pengadaan Traffic light
- Peningkatan Gedung Pengujian Kota Lhokseumawe
- Peningkatan Sarana Prasarana Terminal Penumpang Keude Aceh dan Mobar di Meunasah Mee

10. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selama tahun 2018-2023 telah mendapatkan alokasi dana kegiatan melalui DOKA pada tahun 2018, 2020, 2022, dan 2023. Besaran DOKA yang diterima oleh BPBD dapat dilihat pada table dibawah ini. Bila dilihat dari persentase terhadap nilai total DOKA Kota Lhokseumawe, memang angkanya masih sangat kecil.

Alokasi DOKA pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2028-2023

Tahun	DOKA BPBD (Rp)	DOKA Kota Lhokseumawe (Rp)	% terhadap DOKA Lhokseumawe
2023	500.000.000	29.841.924.184	1,67
2022	1.950.000.000	78.493.551.332	2,42
2021	-	74.560.843.857	-
2020	1.150.000.000	77.603.295.272	1,48
2019	-	79.402.072.351	-
2018	3.390.000.000	86.105.236.240	3,93

BPBD memiliki tiga bidang pelaksana tupoksi kerja pelayanan yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pemadam Kebakaran dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Anggaran DOKA yang diterima selama tahun 2018-2023 untuk BPBD semuanya digunakan untuk bidang Kedaruratan, Pemadam Kebakaran dan Logistik. Jenis kegiatannya berupa pengadaan mobil pemadam kebakaran dan kelengkapannya. Hanya ditahun 2023 yang digunakan untuk pembangunan pos pemadam kebakaran di kecamatan Banda Sakti. Selengkapannya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Alokasi DOKA Berdasarkan Bidang Pelaksana dan Jenis Kegiatan

Tahun	Anggaran DOKA BPBD (Rp)	Bidang Pelaksana	Jenis Kegiatan	Keterangan
2023	500.000.000	Kedaruratan, Pemadam Kebakaran dan Logistik	Pembangunan Fisik	Pembangunan Pos Damkar dan Fasilitasnya
2022	1.950.000.000	Kedaruratan, Pemadam Kebakaran dan Logistik	Pengadaan	Pengadaan Mobil Fire Truck

2021	-		-	
2020	1.150.000.000	Kedaruratan, Pemadam Kebakaran dan Logistik	Pengadaan	Pengadaan Mobil Damkar dan Pengadaan Mobil Water Supply 3000 lt dan 500 lt foam
2019	-		-	
2018	3.390.000.000	Kedaruratan, Pemadam Kebakaran dan Logistik	Pengadaan	Pengadaan Mobil Damkar dan Pengadaan Water supply 5000 lt

Dari table diatas dapat dilihat juga bahwa selama ini alokasi dari DOKA tidak pernah dilakukan untuk kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta tidak pernah dilakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.

11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) hanya di tahun 2023 ini mendapatkan alokasi DOKA. Kegiatan yang dilakukan adalah Penguatan dan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Bidang Pelaksana kegiatan dilakukan oleh Bidang Politik, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)

Kegiatan DOKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun	Anggaran (Rp)	Bidang Pelaksana	Kegiatan
2023	500.000.000	Bidang Politik	Penguatan dan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi DOKA diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena adanya kegiatan besar yang bersifat nasional yang akan dilaksanakan tahun 2024 yaitu pemilihan kepala daerah.

12. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker) mendapatkan anggaran kegiatan DOKA hanya di tahun 2023. Kegiatan yang dilakukan adalah Pelatihan Bengkel Sepeda motor Matic dan bantuan peralatan bengkel dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Ketenagakerjaan.

Kegiatan DOKA DPMPTSP Naker

Tahun	Anggaran (Rp)	Bidang Pelaksana	Kegiatan
2023	500.000.000	Bidang Ketenagakerjaan	Pelatihan Bengkel Sepeda Motor Metic dan Bantuan Peralatan Bengkel untuk 16 orang penerima manfaat

Dari table diatas dapat dilihat bahwa selama ini DPMPTSP Naker belum pernah mendapatkan alokasi DOKA. Untuk alokasi DOKA tahun 2023 ini juga diberikan hanya untuk bidang ketenagakerjaan, sementara untuk bidang pelayanan lainnya tidak mendapatkan porsi anggaran.

13. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

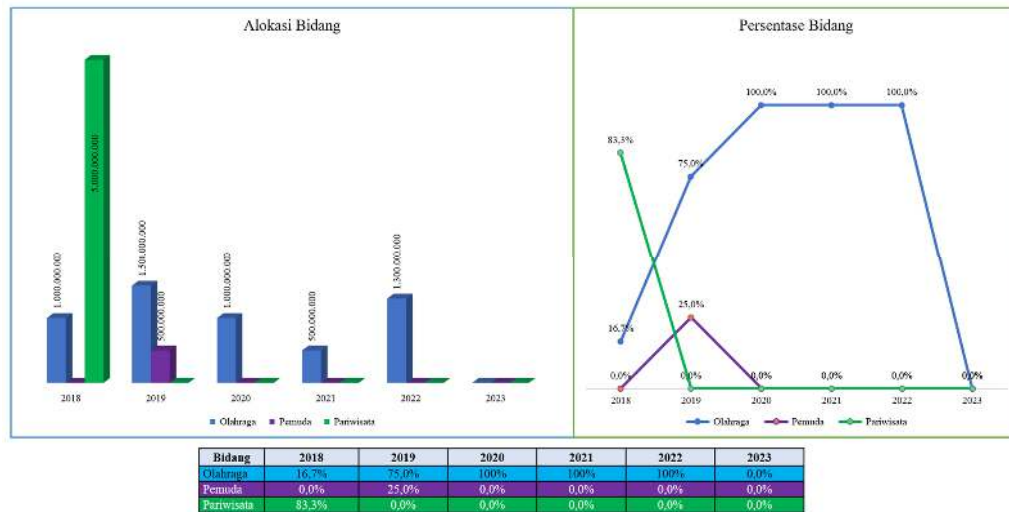
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) selama lima tahun terakhir selalu mendapatkan alokasi anggaran DOKA kecuali di tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Alokasi DOKA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2018-2023



Penggunaan DOKA pada Dispora selama ini lebih banyak digunakan untuk kegiatan bidang olahraga. Dari tahun 2018 sampai tahun 2022 bidang olahraga selalu mendapatkan anggaran DOKA, sedangkan untuk bidang olahraga hanya mendapatkan anggaran DOKA pada tahun 2019. dan bidang pariwisata hanya mendapatkan anggaran pada tahun 2018. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Alokasi DOKA Berdasarkan Bidang Pelaksana Kegiatan



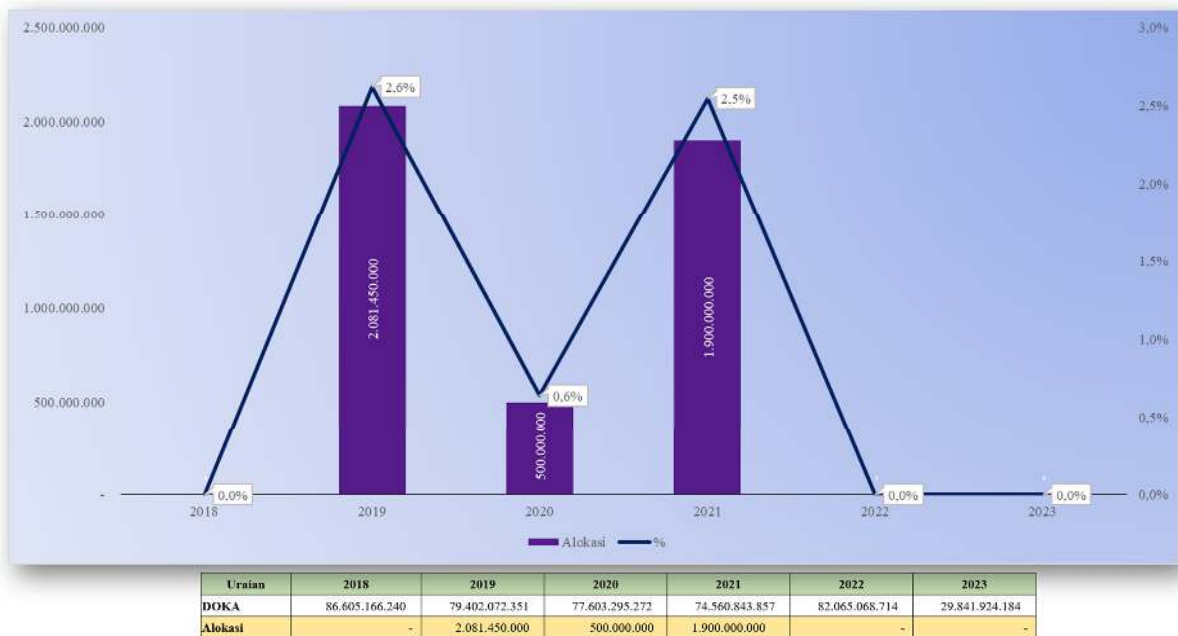
Selama Tahun 2028-2023, kegiatan yang telah dilakukan oleh Disporapar melalui anggaran dari DOKA adalah:

- Tahun 2018 alokasi untuk Penataan Sarana dan Prasarana Wisata Ujong Blang; Pelaksanaan Festival/Pagelaran Seni Budaya Aceh, dan Optimalisasi Fungsionalitas Museum Kota Lhokseumawe. Sedangkan di Bidang Olahraga difokuskan pada Pembinaan dan Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga untuk keikutsertaan POPDA.
- Tahun 2019 alokasi untuk kegiatan pembinaan dan pengadaan peralatan Cabang Olahraga untuk keikutsertaan PORA. Sedangkan di Bidang Pemuda untuk pelaksanaan pelatihan Life Skill Kepemudaan.
- Tahun 2020 alokasi untuk persiapan dan keikutsertaan Pekan Olahraga Pelajar (POPDA) Aceh, dan untuk Pembangunan Arena Balap Motor Cross.
- Tahun 2021 dan 2022 alokasi juga pada Bidang Olahraga untuk Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga; Persiapan dan Keikutsertaan pada event PORA 2022.

14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

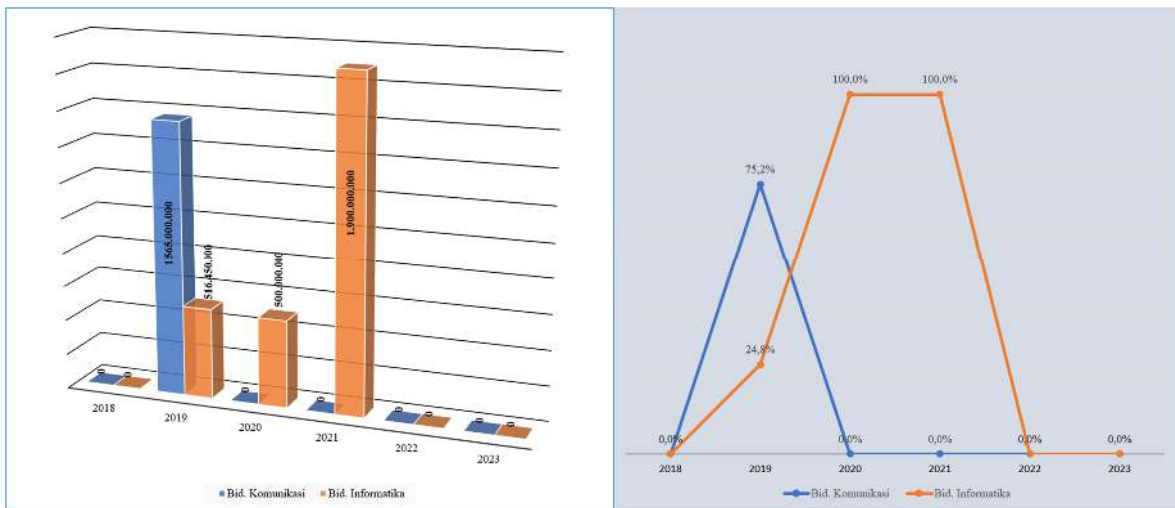
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) mendapatkan anggaran kegiatan DOKA selama tiga tahun berturut turut yaitu tahun 2019, 2020, 2021. Walaupun persentase anggarannya hanya 2,5% dari Total DOKA tahun bersangkutan namun anggaran ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan Diskominfo. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Alokasi DOKA pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2028-2023



Selama 3 tahun mendapatkan alokasi DOKA, total anggaran yang diterima Diskominfo adalah sebesar Rp. 4,48 Milyar. Dana ini diberikan untuk kegiatan pada bidang Komunikasi dan Informatika, sedangkan bidang persandian belum pernah mendapatkan anggaran DOKA.

Alokasi DOKA Berdasarkan Bidang Pelaksana Kegiatan



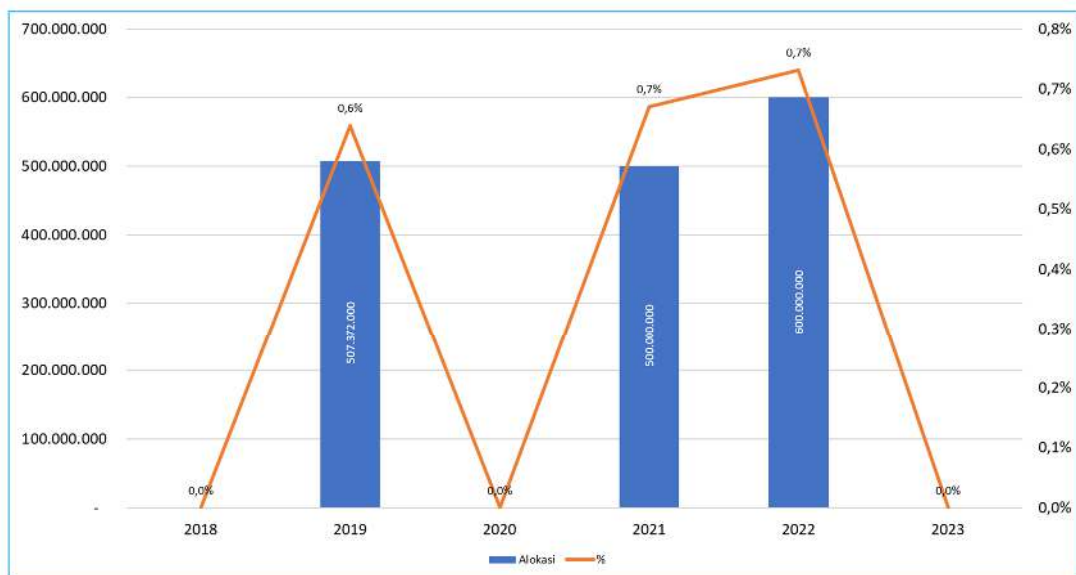
Tahun 2019 alokasi pada Bidang Komunikasi untuk kegiatan Pembangunan Gedung Median Center dan Pengadaan Perangkat Pendukung Media Center serta untuk Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pusat Data Terintegrasi Kota Lhokseumawe, akan tetapi Gedung Media Center tersebut “Belum Difungsikan”.

Tahun 2020 dan 2021 alokasi pada Bidang Informatika untuk Pembangunan Gedung Pusat Data Integrasi/Analisis Data dan Informasi Publik. Gedung Pusat Data Integrasi Sudah Tuntas serta sudah Fungsional.

15. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama rentang tahun 2018-2023 mendapatkan anggaran DOKA pada tahun 2019, 2021, dan 2022. Persentase besaran alokasi DOKA yang diperoleh kurang dari 1% dari total alokasi DOKA tahun bersangkutan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Alokasi DOKA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2023



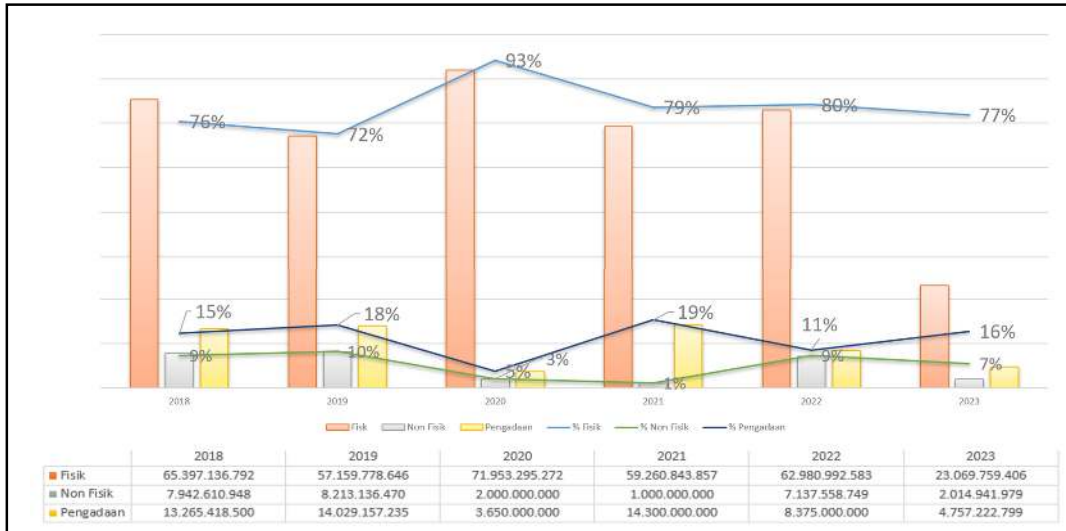
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DOKA	86.605.166.240	79.402.072.351	77.603.295.272	74.560.843.857	82.065.068.714	29.841.924.184
Alokasi	-	507.372.000	-	500.000.000	600.000.000	-

Kegiatan yang dilaksanakan dari alokasi DOKA ini, dilaksanakan oleh bidang Pemberdayaan Perempuan. Kegiatan yang dilakukan adalah pemberdayaan ekonomi bagi kaum perempuan. Tahun 2019, melakukan pelatihan industry rumahan dengan penerima manfaat sebanyak 80 orang. Tahun 2021, melakukan pelatihan aneka olahan ubi dengan penerima manfaat sebanyak 100 orang. Dan pada tahun 2022 dilakukan pelatihan pembuatan bordir dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 200 orang.

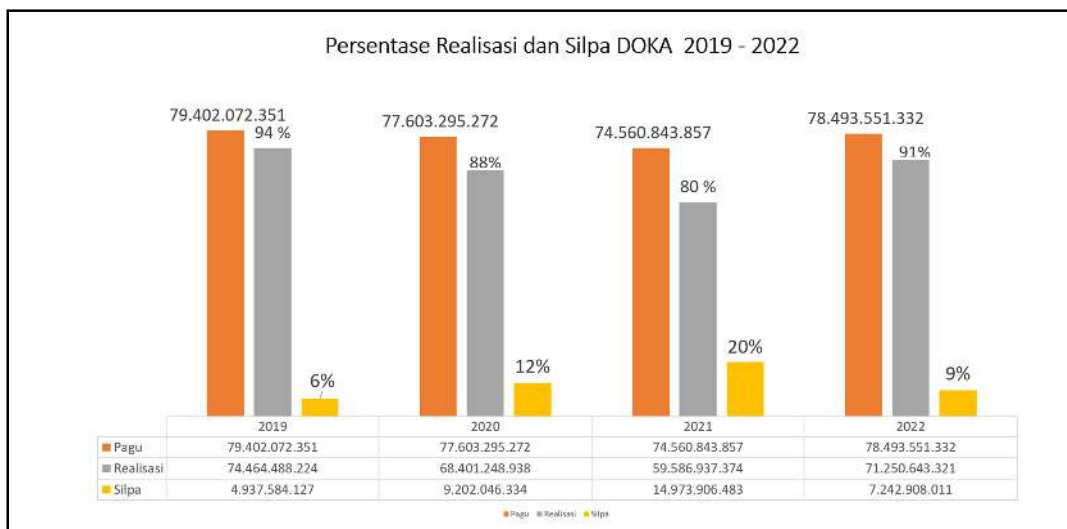
Sementara itu untuk bidang Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, belum pernah mendapatkan alokasi kegiatan dari DOKA.

Dari review yang telah dilakukan terhadap kegiatan yang dilaksanakan melalui alokasi DOKA pada Dinas yang mendapatkan alokasi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Total Dana DOKA yang diterima Kota Lhokseumawe selama Tahun 2018 – 2023 Berjumlah Rp.426.506.853.236,- yang di Belanjakan sebesar 80% Untuk Kegiatan Fisik, 7% Kegiatan Non Fisik dan 14% untuk Kegiatan Pengadaan



2. Belanja Kegiatan Fisik selama 5 Tahun berupa Pembangunan Gedung Kantor, Ruang Kelas Baru, Pustu dan Puskesmas, Masjid dan Pembangunan Dayah Pembangunan Jalan, Jembatan, Saluran. Belanja Kegiatan Non Fisik Selama 5 Tahun berupa Pelatihan untuk masyarakat, peningkatan SDM Guru, Siswa dan tenaga Kependidikan. Kegiatan Pengadaan selama 5 Tahun berupa, Pengadaan Laptop, Mobil Ambulance, dan juga mobil pemadam kebakaran.
3. Untuk Realisasi DOKA Tahun 2019 sebesar 94% dengan silpa 6%, Tahun 2020 sebesar 88% dengan silpa 12%, Tahun 2021 sebesar 80% dan silpa 20%, dan Realisasi Tahun 2022 91% silpa 9% untuk tahun 2018 Pelaksanaan Program Kegiatan DOKA dilakukan oleh Propinsi Aceh.



4. Beberapa bangunan Gedung yang telah dibangun menggunakan DOKA selama lima tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:



Gedung Media Center

Gedung Media Center

Lokasi : Alue Awe
 TA Pembangunan : 2019, Rp. 2.081.450.000
 Penanggung Jawab : Dinas Kominfo
 Status Bangunan : Belum Fungsional



Gedung Pusat Data & Informasi

Gedung Pusat Data dan Informasi

Lokasi : Max Gedung
 TA Pembangunan : 2020, 2021,
 Rp. 2.400.000.000
 Penanggung Jawab : Dinas Kominfo
 Status Bangunan : Fungsional



Gedung Kesenian

Gedung Kesenian

Lokasi : Cot Girek Kandang
 TA Pembangunan : 2018, 2019, 2022
 Rp. 7.769.335.6953
 Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan
 Status Bangunan : Belum Fungsional



Gedung Diklat BKPSDM

Gedung Peningkatan Mutu SDM

Lokasi : Jeulikat
 TA Pembangunan : 2020, Rp. 8.843.159.054
 Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan
 Status Bangunan : Belum Fungsional



Gedung Warehouse

Gedung Warehouse

Lokasi : Cot Girek Kandang
 Pembangunan : 2021, Rp. 2.000.000.000
 Penanggung Jawab : Dinas Lingk. Hidup
 Status Bangunan : Fungsional



REVIEW KEGIATAN DAK KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018 - 2023

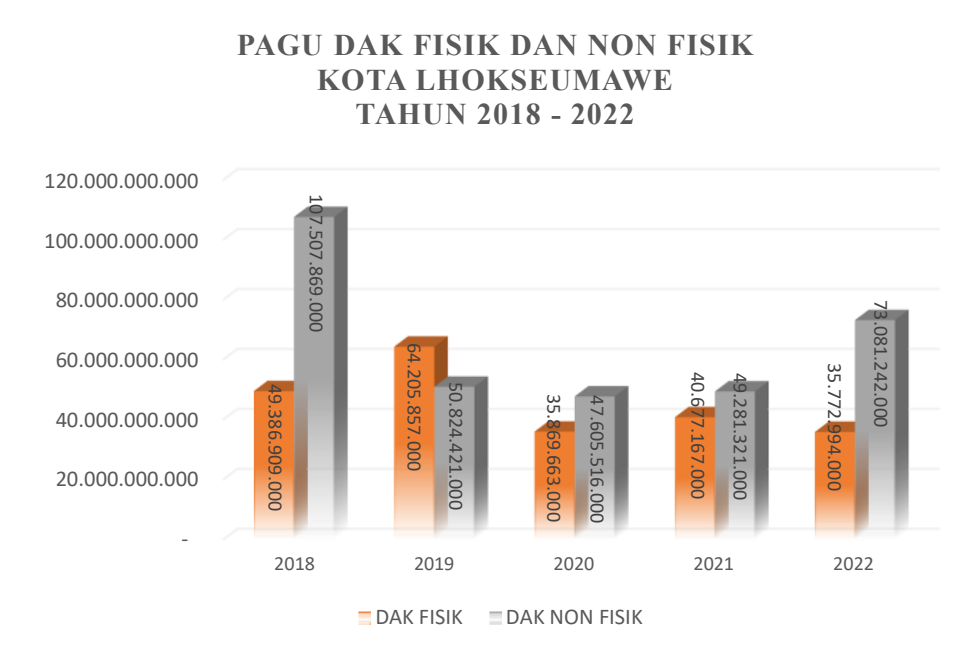
Dana alokasi khusus (DAK) baik DAK fisik maupun DAK nonfisik, merupakan bagian dari transfer ke daerah (TKD). DAK merupakan transfer yang bersifat untuk mencapai tujuan tertentu (*specific purpose transfer*). Kebijakan penggunaan DAK diarahkan pada penugasan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dan fokus pada pencapaian target kinerja.

Menurut UU HKPD dan dikaitkan dengan karakteristik penggunaan transfer, DAK merupakan bentuk transfer yang diarahkan untuk pencapaian tujuan tertentu (*specific purpose transfer*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dimaksud DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan DAK selama ini terdapat beberapa tantangan dan permasalahan. Pertama, DAK menjadi sumber utama belanja modal bagi kebanyakan pemerintah daerah, dimana seharusnya DAK menjadi sumber pendanaan penunjang. Dampaknya pembangunan di daerah untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan prioritas lainnya belum maksimal karena kendala sumber pendanaan (*budget to constraints*) di daerah. Kedua, sebagian besar DAK fisik reguler untuk kegiatan rutin guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), yang seharusnya dipenuhi melalui DAU dan PAD.



Untuk Pagu DAK Kota Lhokseumawe selama lima tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, pagu terbesar didapatkan Kota Lhokseumawe pada tahun 2018 dengan pagu sebesar Rp 156.894.778.000,- Sedangkan pagu terkecil didapatkan pada tahun 2020 dengan pagu sebesar Rp 83.475.179.000,-



Dari lima tahun data grafik diatas, secara umum dak non fisik mendominasi dibandingkan dengan dak fisik. Hal ini terlihat pada tahun 2018, 2020, 2021 dan 2022. Hanya pada tahun 2019 saja, dak fisik lebih besar pagunya dibandingkan dak non fisik. DAK non fisik terbesar ada pada tahun 2018 dengan nominal mencapai Rp 107.507.869.000. Sedangkan DAK Fisik terbesar ada pada tahun 2019 dengan nominal mencapai Rp 64.205.857.000,-

REKAPITULASASI DAK FISIK KOTA LHKSEUMAWE TAHUN 2018 - 2022

DAK FISIK	2018			2019			2020			2021			2022		
	Pagu	Realisasi	Silpa	Pagu	Realisasi	Silpa	Pagu	Realisasi	Silpa	Pagu	Realisasi	Silpa	Pagu	Realisasi	Silpa
Bidang Air Minum	4,731,866,000	4,717,902,127	13,963,873	1,561,045,000	1,561,045,000	-	-	-	-	4,585,549,000	4,354,187,000	231,362,000	4,325,420,000	3,901,976,020	423,443,980
Bidang Perumahan dan Permukiman	-	-	-	2,756,250,000	2,699,620,000	56,630,000	2,218,727,000	2,218,517,700	209,300	2,613,842,000	2,612,646,800	1,195,200	1,334,869,000	1,334,869,000	-
Bidang Sanitasi	10,429,443,000	10,428,350,500	1,092,500	2,344,236,000	2,344,187,000	49,000	-	-	-	1,791,228,000	1,791,200,000	28,000	5,078,897,000	5,078,897,000	-
Bidang Jalan	15,150,564,000	15,140,245,572	10,318,428	28,755,268,000	28,724,449,918	30,818,082				10,115,562,000	10,082,047,751	33,514,249			
Bidang Kelautan dan Perikanan	1,218,889,000	1,217,194,630	1,694,370	1,165,030,000	1,089,192,500	75,837,500	1,258,438,000	1,254,478,100	3,959,900	1,113,000,000	1,113,000,000	-	2,152,542,000	2,152,542,000	-
Bidang Kesehatan	6,851,866,000	6,673,805,900	178,060,100	411,829,000	411,829,000	-	528,961,000	528,936,000	25,000						
Bidang Kesehatan dan KB				6,391,553,000	6,262,798,960	128,754,040	8,333,965,000	7,961,229,810	372,735,190	7,007,001,000	6,797,627,640	209,373,360	6,490,248,000	6,490,243,400	4,600
Bidang Lingkungan													1,300,000,000	1,300,000,000	-
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan				769,169,000	767,174,000	1,995,000									
Bidang Pasar	4,414,420,000	3,943,472,225	470,947,775	1,342,825,000	1,317,524,700	25,300,300									
Bidang Pendidikan	5,997,169,000	5,996,528,000	641,000	13,936,059,000	13,917,427,740	18,631,260	12,230,991,000	12,229,749,287	1,241,714	13,450,985,000	13,393,170,440	57,814,560	11,790,728,000	11,752,770,629	37,957,371
Bidang Pertanian	592,692,000	23,292,000	569,400,000	1,826,951,000	1,819,254,000	7,697,000							3,300,290,000	3,246,007,992	54,282,008

DAK FISIK BIDANG AIR MINUM

DAK Bidang Air Minum Kota Lhokseumawe mendapatkan DAK selama 4 tahun yaitu tahun 2018, 2019, 2021 dan tahun 2022. Pagu tertinggi di dapatkan tahun 2018 dengan pagu mencapai Rp 4.731.866.000,- dan pagu terendah terjadi pada tahun 2019 dengan pagu hanya Rp 1.561.045.000, . Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan realisasi mencapai 100%. Sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2022 dengan realisasi hanya 90,21 % dengan menyisakan pagu sebesar Rp 423.443.980.

DAK FISIK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DAK Bidang Perumahan dan Permukiman, Kota Lhokseumawe mendapatkan pagu selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Pagu terbesar didapatkan pada tahun 2019 dengan nilai mencapai Rp 2.756.250.000,-. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan realisasi mencapai 100 %.

DAK FISIK BIDANG SANITASI

Untuk DAK Bidang Sanitasi, Kota Lhokseumawe mendapatkannya setiap tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Pagu terbesar didapatkan pada tahun 2020 dengan pagu mencapai Rp 11.298.581.000,- Realisasi hampir setiap tahunnya mendekati 100%.

DAK FISIK BIDANG JALAN

Kota Lhokseumawe tidak mendapatkan dana DAK pada tahun 2020 dan tahun 2022. Pagu tertinggi didapatkan pada tahun 2019 dengan nilai mencapai Rp 28.755.268.000,-. Tahun 2018 adalah nilai realisasi tertinggi DAK Bidang jalan yang mencapai 98,96 % dengan menyisakan anggaran hanya Rp 10.318.428

DAK FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Kota Lhokseumawe selalu mendapatkan DAK. Selama dua tahun berturut-turut realisasi mencapai 100 % yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2022. Pada tahun 2022 pun pagunya mencapai Rp 2.152.542.000,- yang mana ini pagu tertinggi dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022.

DAK FISIK BIDANG KESEHATAN

Untuk DAK Bidang Kesehatan, Kota Lhokseumawe mendapatkan selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2018, 2019 dan tahun 2020. Pagu terbesar didaptkan pada tahun 2018

dengan nilainya mencapai Rp 6.851.866.000,- . Angka realisasinya pun mencapai diatas 97 % dengan realisasi tertinggi terjadi tahun 2019 dimana realisasi mencapai 100%.

DAK FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KB

Secara umum DAK Bidang Kesehatan dan KB setiap tahunnya kita mendapatkan pagu diatas enam milyar rupiah. Pagu tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan pagu mencapai Rp 8.333.965.000. Silpa terendah terjadi pada tahun 2022 dengan angka silpa hanya Rp 4.600,- . dan realisasi mencapai 99,9999%.

DAK FISIK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Untuk DAK Bidang Lingkungan Hidup, Kota Lhokseumawe hanya mendapatkan tahun 2022 saja, dengan nilai mencapai Rp 1.300.000.000 dan nilai realisasinya pun mencapai 100 % juga.

DAK FISIK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DAK Bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Kota Lhokseumawe hanya mendapatkan tahun 2019 saja dengan pagu sebesar Rp 769.169.000,- dengan tingkat realisasi mencapai 99,74 % dan menyisakan anggaran sebesar Rp 1.995.000,-

DAK FISIK BIDANG PASAR

Untuk DAK Bidang Pasar Kota Lhokseumawe mendapatkan pagu hanya 2 tahun yaitu tahun 2018 dan tahun 2019. Tahun 2018 pagu yang diterima Kota Lhokseumawe mencapai Rp 4.414.420.000 dan tahun 2019 terjadi penurunan pagu menjadi 1.342.825.000. realisasi terbesar terjadi pada tahun 2019 dengan tingkat realisasi mencapai 98,12 %.

DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN

Bidang Pendidikan Kota Lhokseumawe selama 5 tahun selalu mendapatkan pagu DAK. Pagu terbesar terjadi pada tahun 2019 dengan pagu mencapai Rp13.936.059.000. Realisasi terbesar terjadi pada tahun 2020 dengan tingkat realisasi mencapai 99,99%.

DAK FISIK BIDANG PERTANIAN

DAK Bidang pertanian, Kota Lhokseumawe hanya mendapatkan selama tiga tahun yaitu tahun 2018,2019 dan tahun 2022. Tahun 2022 adalah pagu terbesar DAK Bidang Pertanian yang mencapai Rp 3.300.290.000. Namun realisasi terbesar terjadi pada tahun 2019 dimana realisasi DAK mencapai 99,58 %.

REKAPITULASASI DAK NON FISIK KOTA LHOKSEUMAWA TAHUN 2018 - 2022

DAK Non FISIK	2018			2019			2020			2021			2022		
	Pagu	Realisasi	Silpa	Pagu	Realisasi	Silpa	Pagu	Realisasi	Silpa	Pagu	Realisasi	Silpa	Pagu	Realisasi	Silpa
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	792,406,000	787,574,034	4,831,966	911,267,000	898,046,800	13,220,200	810,275,000	767,378,085	42,896,915	997,973,000	994,584,780	3,388,220	3,388,220	3,388,220	-
Dinas Kesehatan	7,092,578,000	6,602,103,749	490,474,251	5,326,580,000	4,953,570,624	373,009,376	7,913,292,000	6,223,972,025	1,689,319,975	4,700,184,000	4,635,422,500	64,761,500	3,177,693,000	2,400,739,740	776,953,260
DKPPPP										490,000,000	482,997,600	7,002,400	631,300,000	616,875,600	14,424,400
DPMPTSP dan Naker										326,122,000	289,563,010	36,558,990	388,654,000	320,931,000	67,723,000
Dinas PPPAPP Dan KB	1,080,330,000	673,438,390	406,891,610	1,114,817,000	812,193,467	302,623,533	1,390,108,000	1,297,915,213	92,192,787	1,217,453,000	1,117,217,124	100,235,876	2,237,137,000	1,540,844,578	696,292,422
Disperindagkop dan UKM										390,304,000	378,149,180	12,154,820	400,800,000	382,702,200	18,097,800
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	44,440,056,000	40,189,223,420	4,250,832,580	43,471,757,000	41,014,647,750	2,457,109,250	37,491,841,000	36,328,358,400	1,163,482,600	41,159,285,000	37,384,700,861	3,774,584,139	66,245,658,000	65,876,241,635	369,416,365

DAK NON FISIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DAK Non Fisik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kota Lhokseumawe mendapatkannya selama empat tahun berturut-turut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Namun di tahun 2022 kita tidak mendapatkannya. Rata rata selama empat tahun tersebut tingkat realisasinya mencapai 98 %. Pagu tertinggi terdapat pada tahun 2021 dengan angka mencapai Rp 997.973.000.

DAK NON FISIK DINAS KESEHATAN

DAK Non Fisik pada dinas Kesehatan lumayan berfluktuasasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pagu tertinggi terdapat pada tahun 2020 dengan pagu mencapai Rp 7.913.292.000 dan tingkat realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan realisasi mencapai 98,62 %.

DAK NON FISIK DINAS DKPPP

Pada DKPPP DAK non fisik didapatkan hanya pada tahun 2021 dan 2022 saja. Dengan nilai terbesar pada tahun 2022 mencapai Rp 631.300.000,- Namun realisasi terbesar terjadi pada tahun 2021 dengan tingkat realisasi mencapai 98,57 %.

DAK NON FISIK DINAS DPMPTSP DAN NAKER

Dinas DPMPTSP dan Naker juga hanya mendapatkan DAK non Fisik tahun 2021 dan 2022 saja. Rata rata realisasi kedua tahun tersebut mencapai 85,68 %. Pagu terbesar didapatkan tahun 2022 dengan nilai mencapai Rp 388.654.000.

DAK NON FISIK DINAS PPPAPP DAN KELUARGA BERENCANA

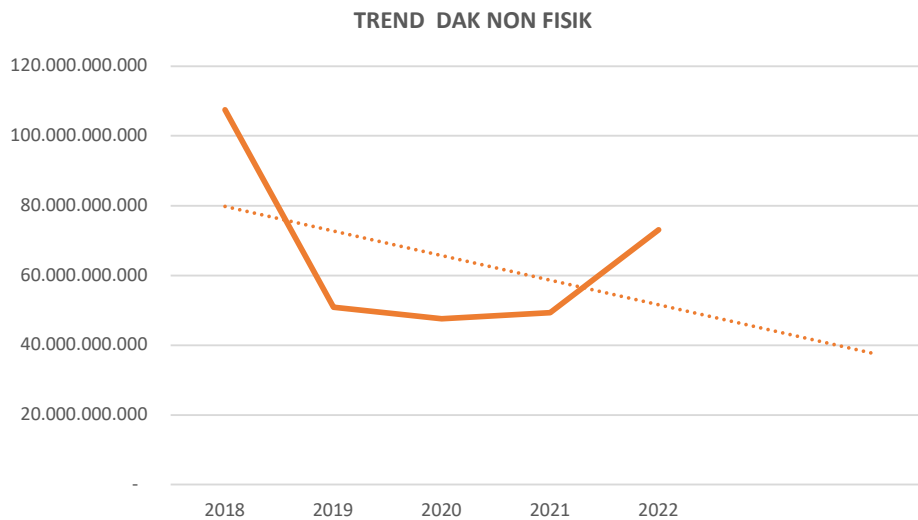
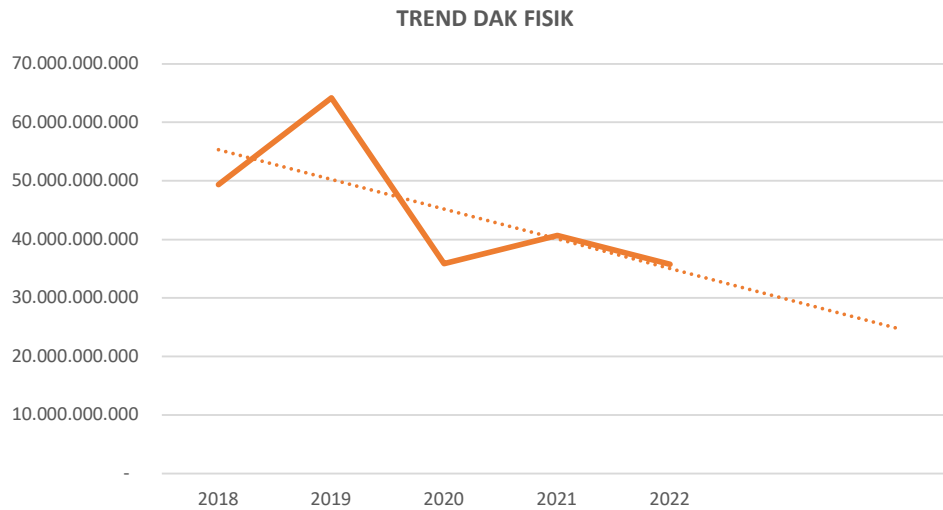
Untuk Dinas PPPAPP dan KB, mendapatkan DAK non fisik selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pagu tertinggi didapatkan tahun 2022 dengan nilai mencapai Rp 2.237.137.000 dan realisasi tertinggi tahun 2020 dengan realisasi mencapai 93,37 %.

DAK NON FISIK DINAS DISPERINDAGKOP DAN UKM

Pada Disperindagkop dan UKM, Pemerintah Kota Lhokseumawe hanya mendapatkan selama dua tahun saja yaitu tahun 2021 dan 2022. Rata-rata pagu yang didapatkan selama dua tahun tersebut adalah Rp 395.552.000 dengan nilai realisasinya rata-rata mencapai 96,19%.

DAK NON FISIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Untuk DAK Non Fisik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Lhokseumawe mendapatkannya setiap tahunnya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pagu tertinggi didapatkan Kota Lhokseumawe tahun 2022 dengan nilai pagu mencapai Rp 66.245.658.000. Namun realisasi tertinggi adalah tahun 2020 dengan nilai realisasi mencapai 96,90 %.

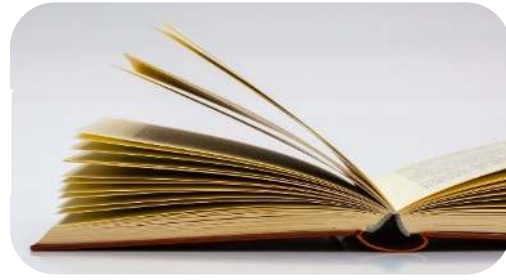


Secara umum, DAK yang ada di Kota Lhokseumawe trendnya pagu yang diterima selama tahun 2018 – 2022 cenderung menurun

KESIMPULAN

- Pemko Lhokseumawe melalui dinas teknis terkait DAK Fisik, harus lebih jeli melihat aturan yang berkaitan dengan DAK Fisik termasuk didalamnya persyaratan dalam usulan DAK Fisik. Data dukung seperti DAPODIK di Dinas Pendidikan, Database jalan di Dinas Pekerjaan umum, ASPAK (aplikasi sarana, prasarana dan alat Kesehatan) di Dinas Kesehatan, BIMA (DKPPP) harus senantiasa di update dan menjadi perhatian semua pihak.
- Perlu peningkatan pemahaman terhadap data dukung yang dibutuhkan dalam perencanaan DAK Fisik di dinas teknis
- Persyaratan dalam juknis dinas pengampu DAK hendaknya dilaksanakan secara maksimal, sehingga mampu meningkatkan pagu dak di tahun tahun mendatang. Hal ini berdasarkan temuan salah satunya tidak dimasukkan sekolah swasta untuk usulan dak di dinas pendidikan

REVIEW KEGIATAN APBK LHOKSEUMAWE



Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBK dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif.

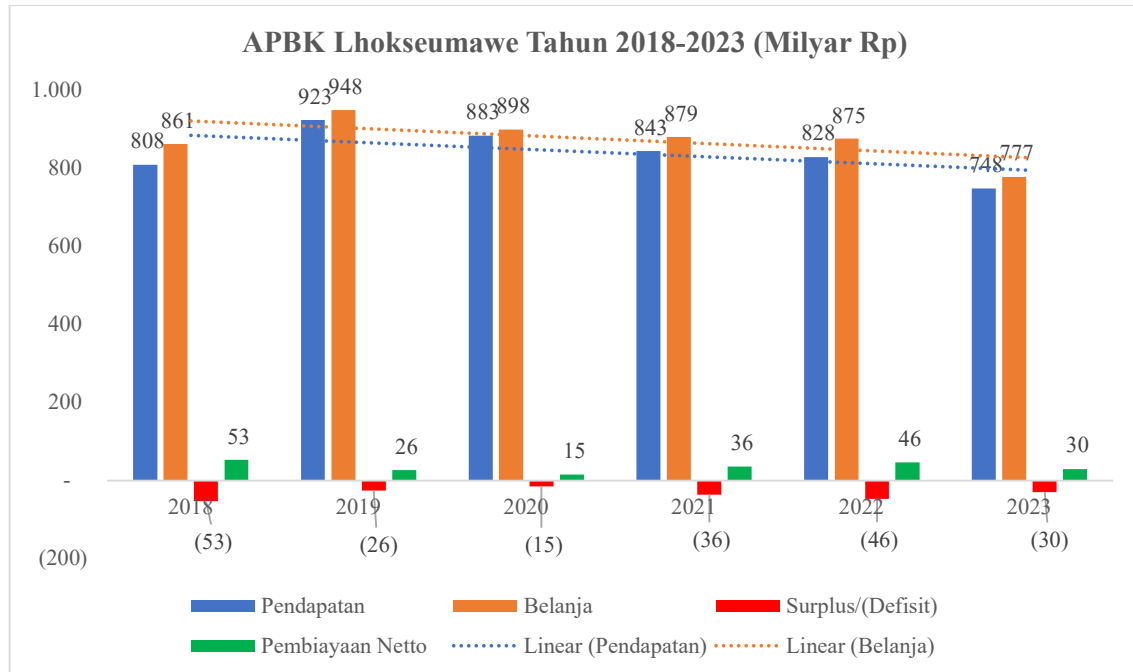
APBK terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di dalam pos PAD terdapat komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber utama dari Pemerintah Kota Lhokseumawe yang diperoleh dari wajib pajaknya dan wajib retribusinya. Selanjutnya Dana Transfer merupakan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Di dalam Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terdapat komponen Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah/Fiskal, dan Dana Desa. Sedangkan pada Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi terdapat komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Bantuan Keuangan Provinsi (berupa Dana Otonomi Khusus Aceh, dan Bantuan Keuangan lainnya). Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari PAD, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, Pemerintah Kota Lhokseumawe juga memperoleh pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa Pendapatan Hibah, ataupun pendapatan lainnya.

Komponen belanja daerah merupakan perwujudan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Terdapat empat pos utama di dalam belanja daerah yaitu pos Belanja Operasi, pos Belanja Modal, pos Belanja Tak Terduga, dan pos Belanja Transfer. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi peruntukan belanja oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada masyarakat.

Dalam APBK, pemerintah daerah dapat merencanakan defisit atau surplus APBK. Namun pada kenyataannya, di dalam Dokumen APBK seringkali terjadi defisit daerah. Defisit daerah dapat ditutupi dengan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari pos yaitu

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kecenderungan untuk menutupi defisit daerah biasanya berasal dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya yang berada pada pos penerimaan pembiayaan. Pos pengeluaran pembiayaan biasanya digunakan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

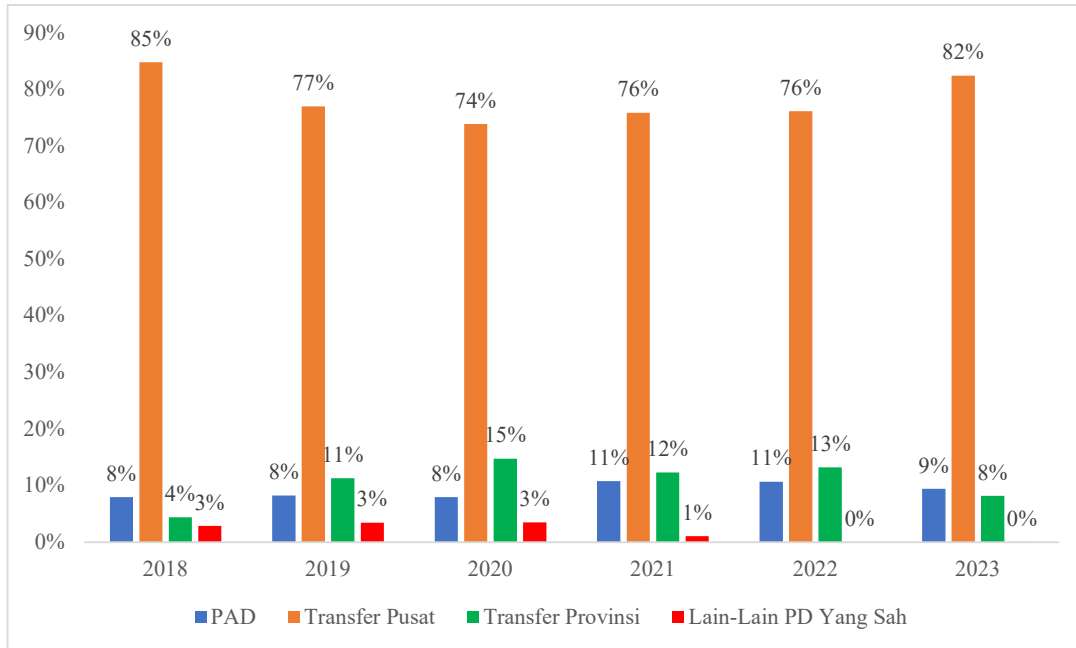
Gambaran Umum APBK Lhokseumawe



Sumber: APBK Lhokseumawe 2018-2023, (diolah)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe selama periode tahun 2018-2023 sangat berfluktuatif dengan trend yang menurun. Persentase rata-rata pertumbuhan belanja Lhokseumawe selama periode 2018-2023 minus sebesar -2,02%, dan pertumbuhan pendapatan minus sebesar -1,54%. Jumlah APBK tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan total belanja sebesar Rp.948 Milyar dan APBK terendah terjadi pada tahun 2023 dengan total belanja sebesar Rp.777 Milyar. Defisit anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai hingga Rp.53 Milyar, dan defisit terendah terjadi pada tahun 2020 yang mencapai Rp.15 Milyar. Defisit anggaran tersebut ditutupi dengan Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya. Selain untuk menutupi defisit anggaran, penerimaan pembiayaan juga digunakan untuk pengeluaran pembiayaan, diantaranya untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah.

Gambaran Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe

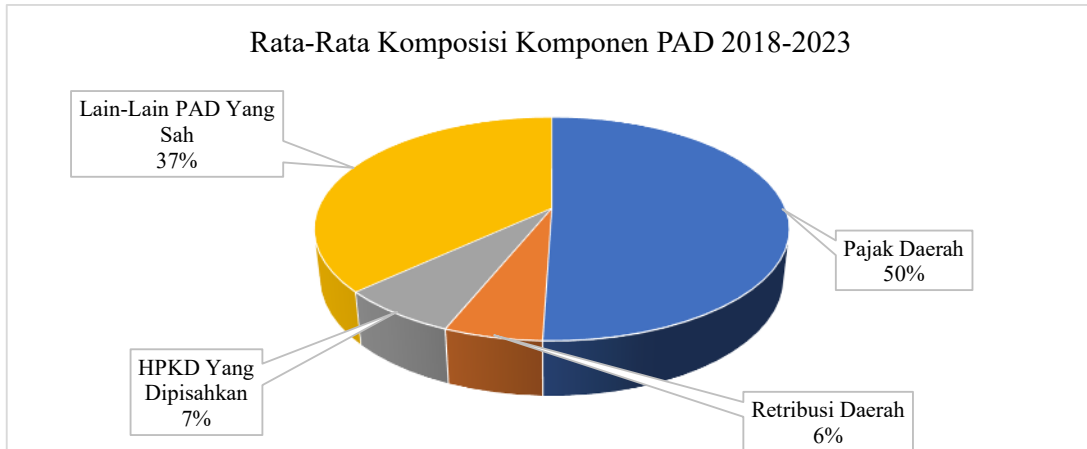


Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata	Komposisi Rata-rata
Pendapatan Daerah	807,871,157,381	922,536,203,518	882,717,271,430	843,409,193,949	828,367,052,987	747,709,000,000	838,768,313,211	100%
PAD	64,287,617,843	76,178,941,193	70,342,465,350	91,165,667,619	88,262,140,311	70,167,263,361	76,734,015,946	9%
Transfer Pusat	684,909,277,932	710,066,988,101	651,627,000,235	639,410,182,449	630,337,254,889	615,885,706,000	655,372,734,934	78%
Transfer Provinsi	35,594,341,606	104,589,880,470	129,925,605,845	103,933,799,881	109,767,657,787	61,116,030,639	90,821,219,371	11%
Lain-Lain PD Yang Sah	23,079,920,000	31,700,393,754	30,822,200,000	8,899,544,000	-	540,000,000	15,840,342,959	2%

Sumber: APBK Lhokseumawe 2018-2023, (diolah)

Komposisi pendapatan daerah pada APBK dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat masih mendominasi sumber pendapatan Kota Lhokseumawe yang mencapai hingga 78% selama periode tahun 2018-2023 dengan rata-rata setiap tahun sebesar Rp.655,3 Milyar, selanjutnya Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi mencapai 10,83% atau rata-rata per tahun mencapai Rp.90,8 Milyar. Sedangkan PAD Kota Lhokseumawe rata-rata setiap tahunnya memberikan kontribusi sebesar 9% atau sebesar Rp.76,7 Milyar, dan komposisi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 2% atau Rp.15,8 Milyar. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe masih sangat tergantung sekali terhadap pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Komposisi Pendapatan Asli Daerah



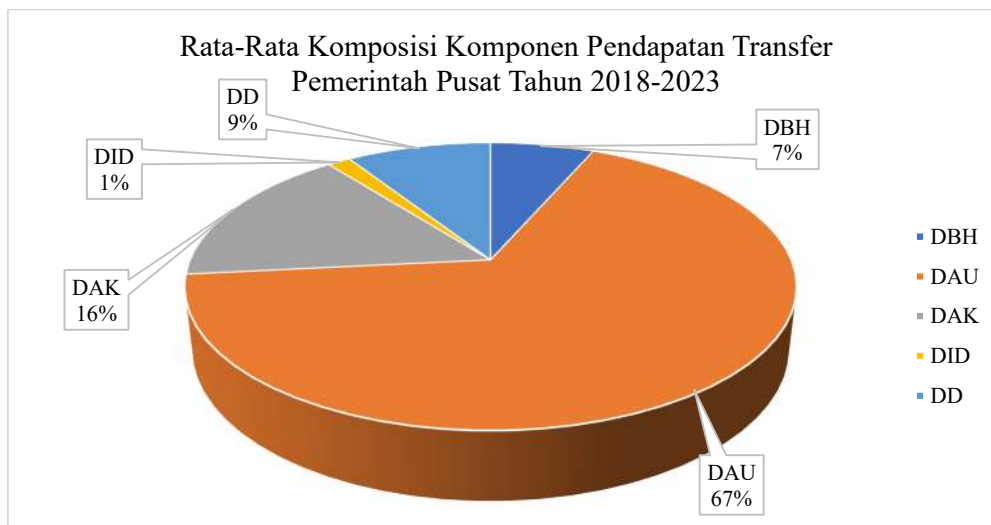
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata	Komposisi Rata-rata
Pendapatan Asli Daerah	64,287,617,843	76,178,941,193	70,342,465,350	91,165,667,619	88,262,140,311	70,167,263,361	76,734,015,946	100%
Pajak Daerah	29,182,500,000	34,282,500,000	35,237,500,000	48,791,981,138	51,002,250,000	34,060,750,000	38,759,580,190	51%
Retribusi Daerah	4,428,500,000	4,719,823,350	4,471,983,350	4,319,500,000	3,996,000,000	4,087,500,000	4,337,217,783	6%
HPKD Yang Dipisahkan	5,200,000,000	6,000,000,000	5,200,000,000	5,200,000,000	5,200,000,000	5,200,000,000	5,333,333,333	7%
Lain-Lain PAD Yang Sah	25,476,617,843	31,176,617,843	25,432,982,000	32,854,186,481	28,063,890,311	26,819,013,361	28,303,884,640	37%

Sumber: APBK Lhokseumawe 2018-2023, (diolah)

Komposisi Pendapatan Asli Daerah secara umum dibagi dalam empat bagian utama yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD) yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Selama periode tahun 2018-2023 Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan tertinggi dari PAD Kota Lhokseumawe dengan rata-rata pertahunnya mencapai Rp.38,7 Milyar atau setara dengan 51% dari total PAD Kota Lhokseumawe. Selanjutnya komposisi terbesar kedua yaitu Lain-Lain PAD yang Sah dengan rata-rata pertahunnya sebesar Rp.28,3 Milyar atau 37% dari total PAD Kota Lhokseumawe. Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah masing-masing berkontribusi rata-rata pertahun sebesar 7% dan 6%.

Komposisi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

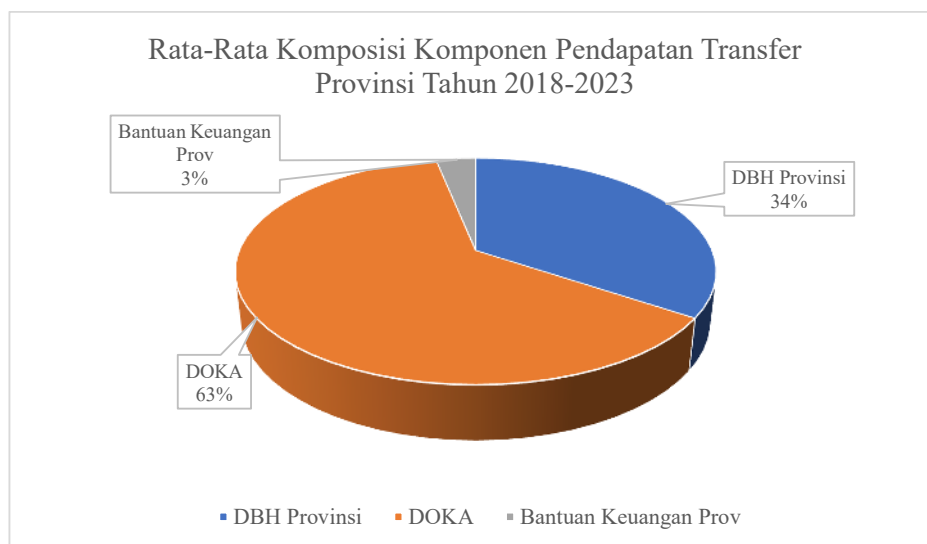
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata	Komposisi Rata-rata
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	684,909,277,932	710,066,988,101	651,627,000,235	639,410,182,449	630,337,254,889	615,885,706,000	655,372,734,934	100%
DBH	68,386,462,932	56,773,845,101	61,278,718,235	27,803,662,449	25,978,449,889	17,283,623,000	42,917,460,268	7%
DAU	459,628,037,000	469,471,445,000	428,195,816,000	418,626,656,000	418,626,656,000	433,613,526,000	438,027,022,667	67%
DAK	102,792,279,000	115,030,278,000	83,475,179,000	114,840,688,000	108,854,236,000	105,256,051,000	105,041,451,833	16%
DID	-	-	18,391,468,000	16,156,027,000	22,949,580,000	-	9,582,845,833	1%
DD	54,102,499,000	68,791,420,000	60,285,819,000	61,983,149,000	53,928,333,000	59,732,506,000	59,803,954,333	9%



Sumber: APBK Lhokseumawe 2018-2023, (diolah)

Pendapatan Kota Lhokseumawe yang bersumber dari Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa (DD). Selama periode tahun 2018-2023 DAU merupakan sumber pendapatan tertinggi dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dengan rata-rata pertahun mencapai Rp.438 Milyar atau sebesar 67% dari rata-rata dana transfer pemerintah pusat. Selanjutnya Dana Alokasi Khusus rata-rata mencapai Rp.105 Milyar atau sebesar 16%. Selebihnya berasal dari Dana Desa sebesar 9%, Dana Bagi Hasil sebesar 7% dan Dana Insentif Daerah sebesar 1%.

Komposisi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

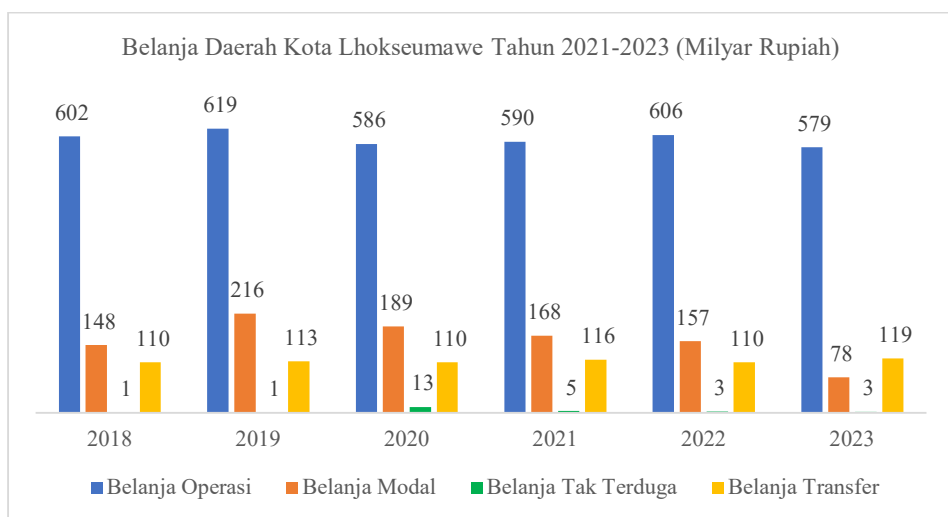


Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata	Komposisi Rata-rata
Pendapatan Transfer Antar Daerah	35,594,341,606	104,589,880,470	129,925,605,845	103,933,799,881	109,767,657,787	61,116,030,639	90,821,219,371	100%
DBH Provinsi	35,594,341,606	25,177,808,119	34,763,380,046	29,372,956,024	31,220,106,455	31,274,106,455	31,233,783,118	34%
DOKA	-	79,412,072,351	77,796,396,799	74,560,843,857	78,547,551,332	29,841,924,184	56,693,131,421	62%
Bantuan Keuangan Prov	-	-	17,365,829,000	-	-	-	2,894,304,833	3%

Sumber: APBK Lhokseumawe 2018-2023, (diolah)

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), dan Bantuan Keuangan. Selama periode tahun 2018-2023 DOKA merupakan pendapatan tertinggi dari pemerintah provinsi dengan rata-rata pertahun mencapai Rp.56,6 Milyar atau sebesar 62% dari total dana transfer provinsi. Selanjutnya DBH dari Provinsi rata-rata pertahun mencapai Rp.31 Milyar atau sebesar 34%, dan Bantuan Keuangan sebesar 3%.

Gambaran Belanja Daerah Kota Lhokseumawe



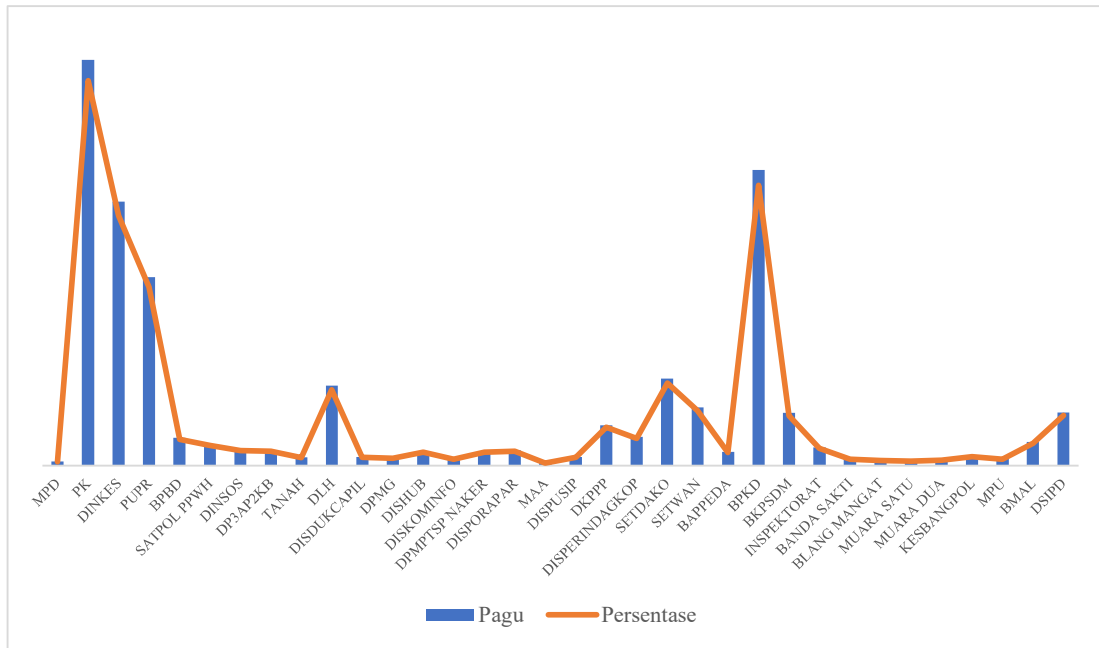
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata	Komposisi Rata-rata
Belanja Daerah	860,904,569,165	948,495,249,513	898,210,311,849	879,310,221,282	874,851,664,000	777,498,500,000	873,211,752,635	100%
Belanja Operasi	601,998,603,501	619,285,408,505	585,941,965,779	590,366,995,636	605,522,237,180	578,571,742,833	596,947,825,572	68%
Belanja Modal	148,156,508,221	216,007,441,595	188,575,091,181	168,374,880,958	156,583,508,120	77,551,626,452	159,208,176,088	18%
Belanja Tak Terduga	500,000,000	500,000,000	13,428,574,123	4,500,000,000	3,000,000,000	2,850,000,000	4,129,762,354	0.5%
Belanja Transfer	110,249,457,442	112,702,399,413	110,264,680,766	116,068,344,688	109,745,918,700	118,525,130,715	112,925,988,621	13%

Sumber: APBK Lhokseumawe 2018-2023, (diolah)

Komposisi belanja daerah secara umum dibagi ke dalam empat bagian utama yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Rata-rata APBK Lhokseumawe sebesar Rp.873 Milyar, dengan proporsi terbesar adalah Belanja Operasi

yang mencapai rata-rata pertahun Rp.596,9 Milyar atau sebesar 68% dari total belanja daerah. Proporsi Belanja Modal mencapai rata-rata pertahun sebesar Rp.159 Milyar atau sebesar 18% dari total belanja daerah. Selanjutnya Belanja Transfer dengan rata-rata pertahun sebesar Rp.112,9 Milyar atau sebesar 13%, dan Belanja Tak Terduga rata-rata pertahun sebesar Rp.4 Milyar atau sebesar 0,5%.

Rata-rata Pagu Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe



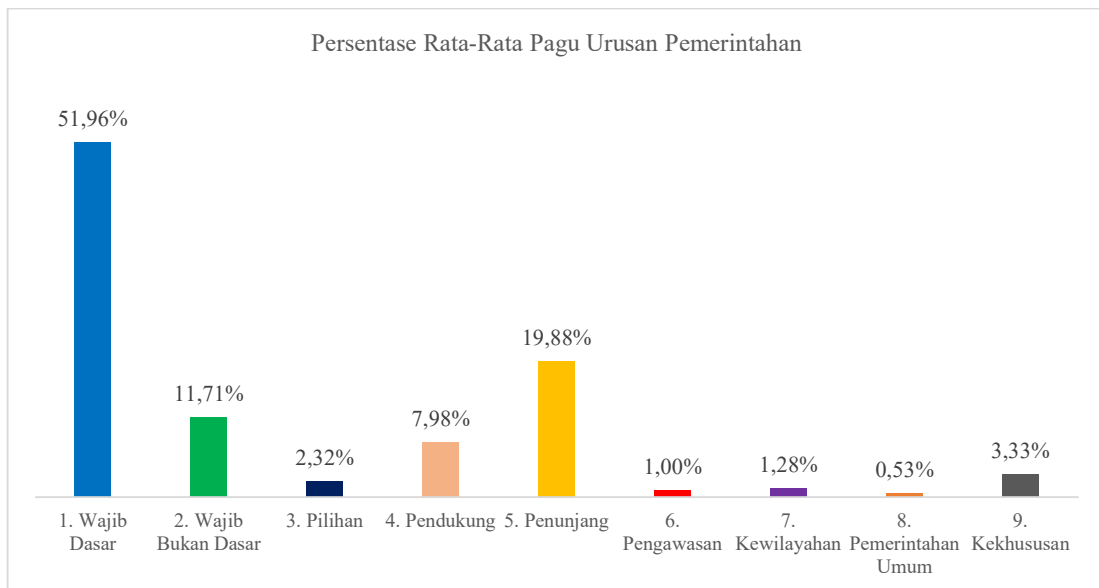
No.	Perangkat Daerah	Pagu	%	No.	Perangkat Daerah	Pagu	%	No.	Perangkat Daerah	Pagu	%
1	MPD	1,974,084,246	0.23%	13	DISHUB	6,602,948,421	0.78%	25	BKPSDM	24,415,559,675	2.89%
2	PK	187,953,725,927	22.27%	14	DISKOMINFO	3,136,258,660	0.37%	26	INSPEKTORAT	8,433,778,432	1.00%
3	DINKES	122,198,621,358	14.48%	15	DPMTSP NAKER	6,532,576,062	0.77%	27	BANDA SAKTI	3,174,217,333	0.38%
4	PUPR	87,221,217,983	10.34%	16	DISPORAPAR	7,159,332,736	0.85%	28	BLANG MANGAT	2,549,943,986	0.30%
5	BPBD	12,888,960,365	1.53%	17	MAA	1,350,214,797	0.16%	29	MUARA SATU	2,341,209,249	0.28%
6	SATPOL PPWH	9,903,237,099	1.17%	18	DISPUSIP	4,095,603,542	0.49%	30	MUARA DUA	2,750,081,923	0.33%
7	DINSOS	7,379,222,548	0.87%	19	DKPPP	18,747,346,263	2.22%	31	KESBANGPOL	4,509,231,959	0.53%
8	DP3AP2KB	7,151,291,530	0.85%	20	DISPERINDAGKOP	13,312,175,601	1.58%	32	MPU	3,153,894,396	0.37%
9	TANAH	3,850,060,561	0.46%	21	SETDAKO	40,393,069,142	4.79%	33	BMAL	10,927,621,573	1.29%
10	DLH	37,097,617,309	4.40%	22	SETWAN	26,969,700,084	3.20%	34	DSIPD	24,636,064,426	2.92%
11	DISDUKCAPIL	4,133,182,140	0.49%	23	BAPPEDA	6,418,332,444	0.76%				
12	DPMG	3,609,895,442	0.43%	24	BPKD	136,916,517,883	16.22%		Jumlah	843,886,795,094	100%

Sumber: APBK Lhokseumawe (diolah)

Alokasi belanja dalam APBK Lhokseumawe setiap tahunnya tersebar pada 34 Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe. Rata-rata pagu tertinggi berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) yang mencapai Rp.187,9 Milyar atau sebesar 22,27% dari total belanja

daerah. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD. Kemudian Dinas Kesehatan mendapatkan alokasi rata-rata pagu mencapai Rp.122 Milyar atau sebesar 14,48%. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan besaran anggaran untuk kesehatan dialokasikan minimal 10% dari anggaran daerah. Alokasi pagu terbesar ketiga berada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yang mencapai Rp.136,9 Milyar atau sebesar 16,22%, alokasi tersebut termasuk untuk belanja transfer ke desa dan dana desa. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) rata-rata alokasi pagu mencapai Rp.87,2 Milyar atau sebesar 10,34%.

Alokasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

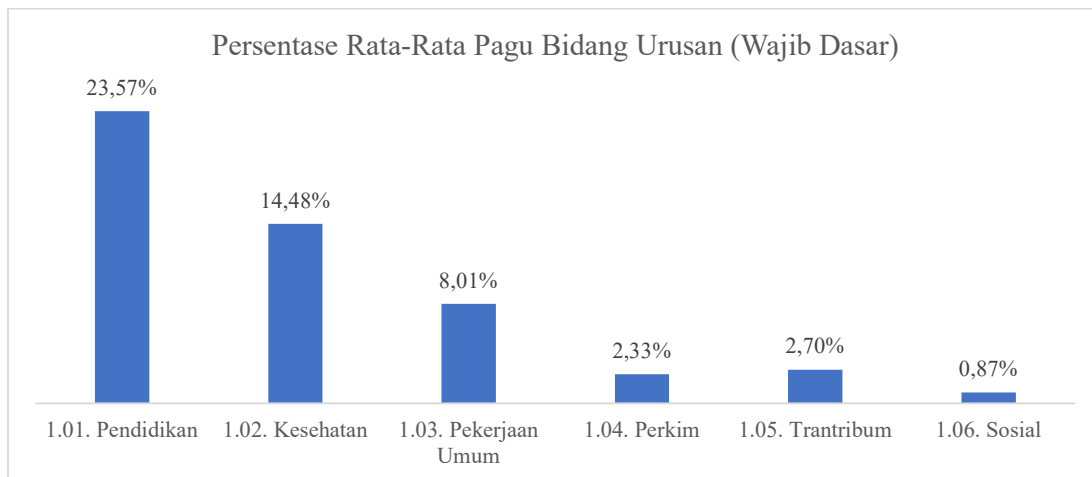


No.	Urusan Pemerintahan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Rata-Rata	
		Pagu	Persentase	Pagu	Persentase	Pagu	Persentase	Pagu	Persentase
1	Wajib Pelayanan Dasar	499,318,846,060	56.79%	439,793,996,758	50.27%	376,314,462,722	48.40%	438,475,768,513	51.96%
2	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	89,775,747,119	10.21%	108,623,758,027	12.42%	98,176,271,437	12.63%	98,858,592,194	11.71%
3	Pilihan	20,649,621,564	2.35%	28,243,302,533	3.23%	9,853,666,760	1.27%	19,582,196,952	2.32%
4	Pendukung	65,363,026,303	7.43%	80,248,432,736	9.17%	56,476,848,639	7.26%	67,362,769,226	7.98%
5	Penunjang	156,766,190,919	17.83%	156,525,802,112	17.89%	189,959,236,975	24.43%	167,750,410,002	19.88%
6	Pengawasan	7,998,688,284	0.91%	8,748,516,770	1.00%	8,554,130,242	1.10%	8,433,778,432	1.00%
7	Kewilayahan	10,606,580,071	1.21%	11,244,107,956	1.29%	10,595,669,446	1.36%	10,815,452,491	1.28%
8	Pemerintahan Umum	3,732,735,472	0.42%	4,631,415,520	0.53%	5,163,544,884	0.66%	4,509,231,959	0.53%
9	Kekhususan	25,098,785,490	2.85%	36,792,331,588	4.21%	22,404,668,895	2.88%	28,098,595,324	3.33%
	Total	879,310,221,282	100%	874,851,664,000	100%	777,498,500,000	100%	843,886,795,094	100%

Sumber: APBK Lhokseumawe (diolah)

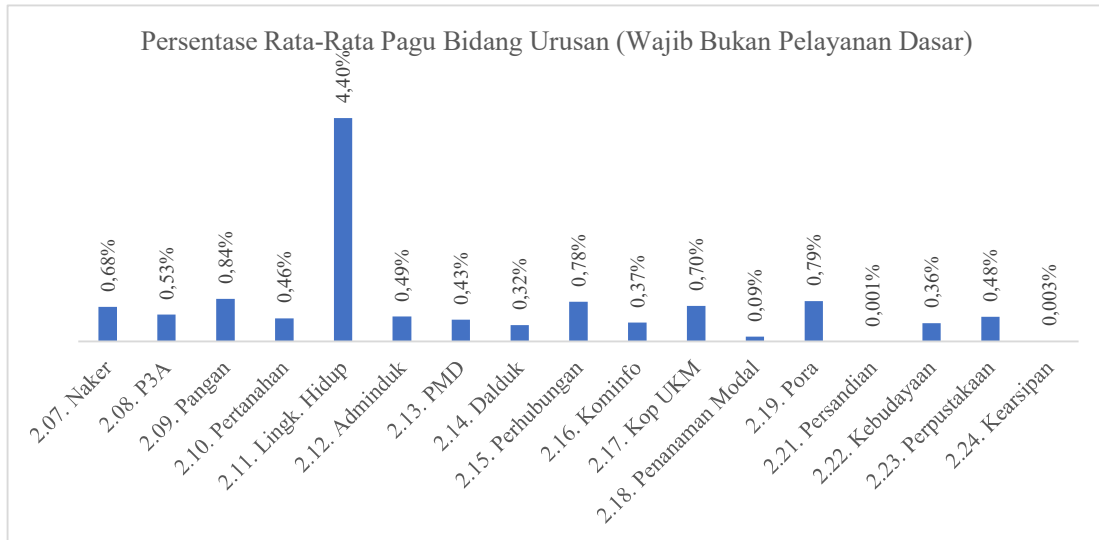
Berdasarkan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 Urusan Pemerintahan terdiri atas sembilan urusan yaitu urusan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, serta unsur kekhususan. Alokasi untuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan yang tertinggi dengan rata-rata pertahun mencapai Rp.438,4 Milyar atau sebesar 51,96%, unsur penunjang rata-rata pertahun Rp.167,7 Milyar atau sebesar 19,88%, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar rata-rata pertahun Rp.98,8 Milyar atau sebesar 11,71%, dan unsur pendukung rata-rata pertahun Rp.67,3 Milyar atau 7,98%.

Alokasi Belanja Menurut Bidang Urusan Pemerintahan



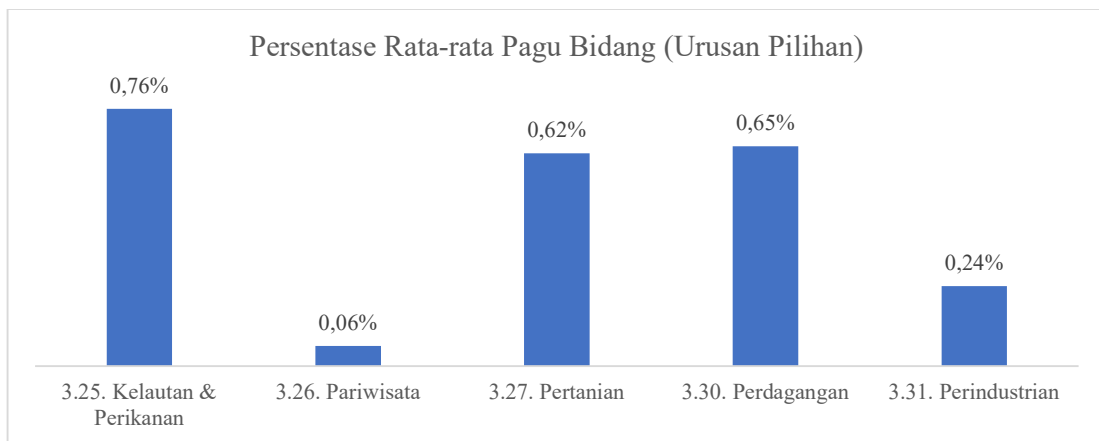
Sumber: APBK Lhokseumawe (diolah)

Bidang urusan yang termasuk dalam Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas enam bidang urusan, yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Bidang Sosial. Alokasi terbesar adalah Bidang Pendidikan yang mencapai rata-rata pertahun Rp.198,8 Milyar atau sebesar 23,57% dari total belanja, selanjutnya Bidang Kesehatan rata-rata pertahun Rp.122,1 Milyar atau sebesar 14,48%, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai Rp.67,5 Milyar atau 8,01%, sedangkan alokasi untuk Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar 2,33% rata-rata pertahun, Bidang Trantribum Linmas sebesar 2,70% rata-rata pertahun, dan Bidang Sosial sebesar 0,87% rata-rata pertahun.



Sumber: APBK Lhokseumawe (diolah)

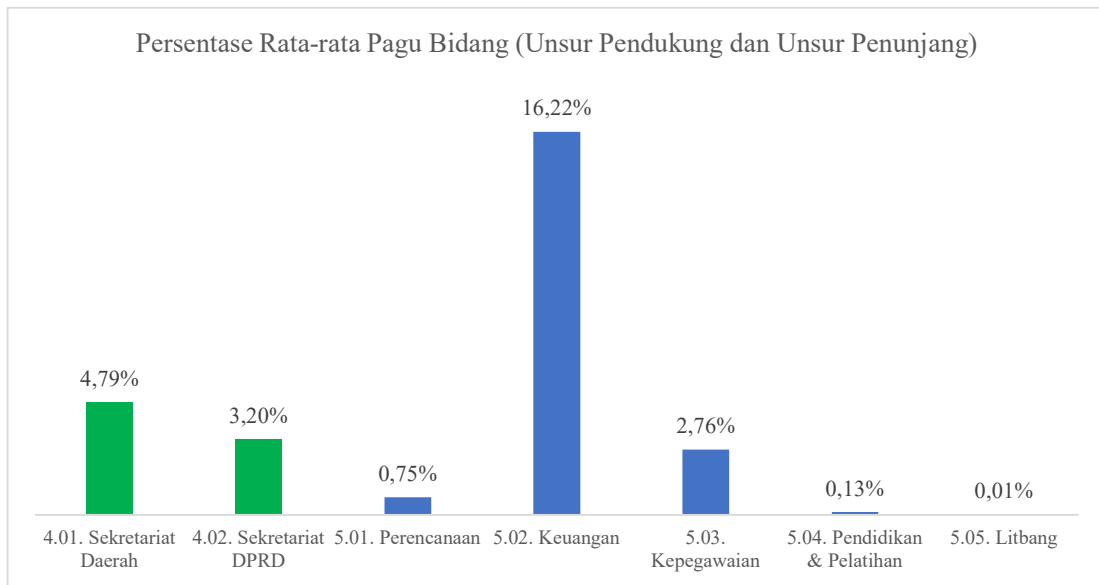
Pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdapat tujuh belas bidang urusan yang diampu oleh perangkat daerah di Kota Lhokseumawe. Alokasi terbesar adalah bidang Lingkungan Hidup yang mencapai rata-rata pertahun Rp.37 Milyar sebesar 4,40% pertahun dari total belanja.



Sumber: APBK Lhokseumawe (diolah)

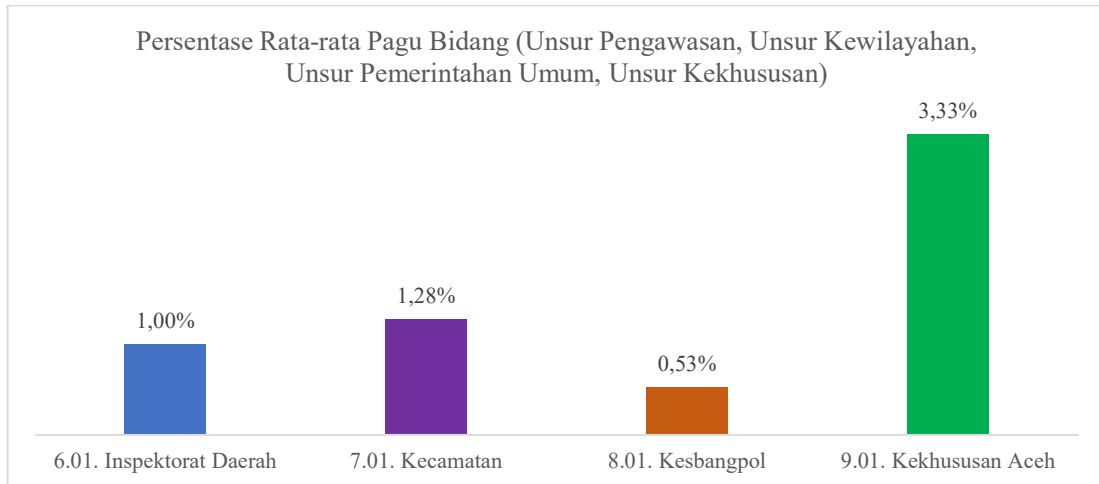
Pada Urusan Pemerintahan Pilihan terdapat lima bidang yang diampu oleh perangkat daerah di Kota Lhokseumawe yaitu Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Pariwisata, Bidang Perdagangan, dan Bidang Perindustrian. Alokasi rata-rata pertahun tertinggi pada Urusan Pilihan adalah Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar 0,76% pertahun dari total rata-rata belanja. Selanjutnya Bidang Perdagangan sebesar rata-rata 0,67% pertahun, Bidang Pertanian sebesar 0,62% rata-rata pertahun, dan Bidang Perindustrian sebesar 0,24% rata-rata pertahun, sedangkan Bidang Pariwisata hanya sebesar 0,06% rata-rata pertahun.

Pada Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terdapat dua unsur yaitu Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD. Unsur Sekretariat Daerah rata-rata pertahun mendapatkan alokasi Rp.40,3 Milyar atau sebesar 4,79% dari total belanja, dan unsur Sekretariat DPRD mendapatkan alokasi Rp.26,9 Milyar rata-rata pertahun atau sebesar 3,20% dari total belanja.



Sumber: APBK Lhokseumawe (diolah)

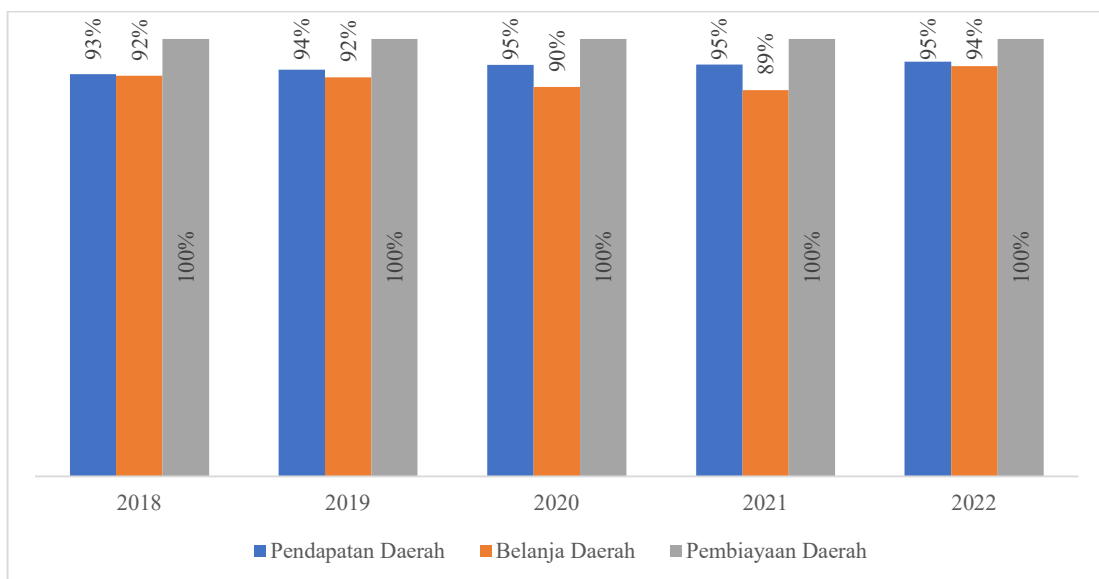
Selanjutnya pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terdapat lima unsur yaitu Unsur Perencanaan, Unsur Keuangan, Unsur Kepegawaian, Unsur Pendidikan dan Pelatihan, dan Unsur Penelitian dan Pengembangan. Dari kelima unsur tersebut alokasi tertinggi berada pada unsur keuangan yang mencapai Rp.136,9 Milyar atau sebesar 16,22% dari total belanja. Dimana pada unsur keuangan terdapat alokasi belanja Dana Desa, dan belanja transfer. Unsur Kepegawaian memperoleh alokasi rata-rata Rp.23,3 Milyar atau sebesar 2,76% rata-rata pertahun dari total belanja. Unsur Perencanaan mendapatkan alokasi rata-rata pertahun Rp.6,3 Milyar atau sebesar 0,75% dari total belanja. Sedangkan unsur Pendidikan dan Pelatihan mendapatkan alokasi rata-rata pertahun 0,13% dari total belanja, serta unsur Penelitian dan Pengembangan hanya memperoleh alokasi rata-rata 0,01% pertahun dari total belanja.



Sumber: APBK Lhokseumawe (diolah)

Alokasi untuk Inspektorat Daerah yang merupakan Unsur Pengawasan rata-rata pertahun sebesar Rp.8,43 Milyar atau 1% dari total belanja. Unsur Kewilayahan yang didalamnya terdapat unsur Kecamatan memperoleh alokasi rata-rata pertahun Rp.10,8 Milyar atau sebesar 1,28% dari total belanja. Sedangkan unsur Pemerintahan Umum yang didalamnya terdapat Unsur Kesbangpol memperoleh alokasi rata-rata pertahun Rp.4,5 Milyar atau sebesar 0,53% dari total belanja. Sedangkan Unsur Kekhususan yang di dalamnya terdapat unsur Kekhususan Aceh dan Keistimewaan mendapatkan alokasi rata-rata pertahun Rp.28 Milyar atau sebesar 3,33% dari total belanja.

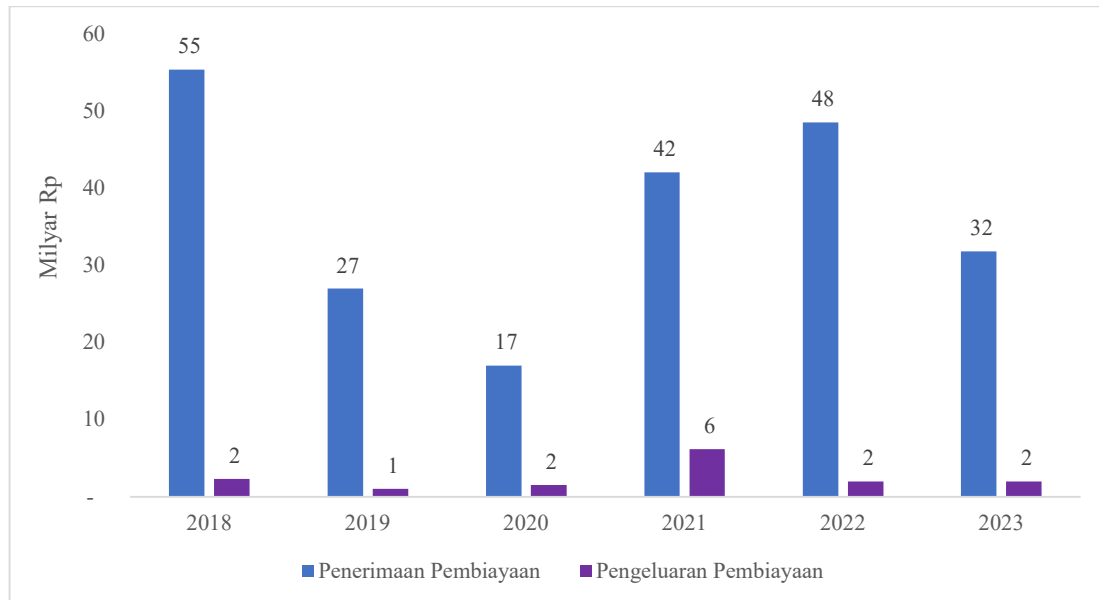
Gambaran Realisasi APBK Lhokseumawe



Sumber: Laporan Realisasi APBK Lhokseumawe (diolah)

Realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2018-2022 berada pada capaian 93% sampai dengan 95%, sedangkan realisasi belanja Kota Lhokseumawe berada pada capaian 89% sampai dengan 94%. Capaian belanja terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 89%. Capaian realisasi pembiayaan selama lima tahun terakhir tercapai 100%.

Gambaran Pembiayaan Daerah Kota Lhokseumawe



Sumber: Laporan Realisasi APBK Lhokseumawe (diolah)

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas dua komponen utama yaitu Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan. Sumber penerimaan pembiayaan daerah yang paling utama berasal dari SILPA tahun sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah, baik pada lembaga keuangan maupun pada perusahaan daerah. Penerimaan SILPA tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai Rp.55 Milyar yang merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2017, dan yang terendah penerimaan SILPA terjadi pada tahun 2020 yang berjumlah Rp.17 Milyar yang merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019. Rata-rata penerimaan SILPA selama tahun 2018-2022 adalah sebesar 3%. Rata-rata Kontribusi SILPA yang berasal dari APBK (selain DOKA dan DAK) adalah 38% terhadap Total SILPA Kota Lhokseumawe.

Kesimpulan Review Kegiatan APBK

1. Rata-rata APBK Lhokseumawe Tahun 2018-2023 Rp.875 Milyar.
2. Rata-rata Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023 Rp.838 Milyar.
3. Komposisi Pendapatan Transfer Pusat sebesar 78%; Pendapatan Transfer Provinsi sebesar 11%; PAD sebesar 9%; Lain-Lain Pendapatan sebesar 2%.
4. Rata-Rata Belanja Daerah Tahun 2018-2023 Rp.873 Milyar.
5. Defisit ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).
6. Rata-rata Komposisi Belanja Operasi (Belanja Pegawai; Barang Jasa; Hibah; dan Bansos) 68%; Belanja Modal 18%; BTT 0,5%, dan Belanja Transfer 13%.
7. Rata-rata Alokasi pada Urusan Wajib Dasar 52%; Urusan Wajib Bukan Dasar 12%; Urusan Pilihan 2%; Unsur Pendukung 8%; Unsur Penunjang 20%; Unsur Pengawasan 1%; Unsur Kewilayahan 1%; Unsur Pemerintahan Umum 1%; dan Unsur Kekhususan 3%.
8. Pada Perangkat Daerah yang Mengampu *Urusan Wajib* dan *Urusan Pilihan*, Persentase Anggaran untuk Mendanai Program Urusan Wajib Lebih Kecil dibandingkan Anggaran untuk Mendanai Program Urusan Pilihan.
9. Rata-rata SiLPA Tahun 2018-2022 sebesar 3%.
10. Rata-rata Kontribusi SiLPA APBK (selain DOKA dan DAK) adalah 38% terhadap Total SiLPA.

Referensi

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018 s.d Tahun Anggaran 2023;
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018 s.d Tahun Anggaran 2022;
3. Kesepakatan Program/Kegiatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018 s.d Tahun Anggaran 2023;
4. Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (RK DAK) Fisik Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018 s.d Tahun Anggaran 2022;
5. Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2018 s.d Tahun Anggaran 2022.